PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SOSIALISASI PAJAK, PERUBAHAN TARIF PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018, TINGKAT KEPATUHAN PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK UMKM

(Studi Kasus pada UMKM di Kota Yogyakarta)

Skripsi

Oleh :

Nama: Zulia Dian Fauzia

No. Mahasiswa: 16312206

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SOSIALISASI PAJAK, PERUBAHAN TARIF PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018, TINGKAT KEPATUHAN PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAKTERHADAP PENERIMAAN PAJAK UMKM

(Studi Kasus pada UMKM di Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Di susun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana

Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Oleh :

Nama: Zulia Dian Fauzia

No. Mahasiswa: 16312206

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Agustus 2020

Penulis,



(Zulia Dian Fauzia)

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SOSIALISASI PAJAK, PERUBAHAN TARIF PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018, TINGKAT KEPATUHAN PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK UMKM

(Studi Kasus pada UMKM di Kota Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

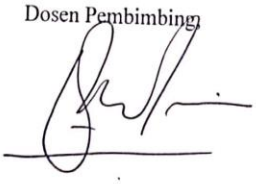
Nama : Zulia Dian Fauzia

No. Mahasiswa : 16312206

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal. 12 - Agustus 2020

Dosen Pembimbing



(Muqodim Drs.,M.B.A.,Ak,)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, SOSIALISASI PAJAK, PERUBAHAN TARIF PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018, TINGKAT KEPATUHAN PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK UMKM (STUDI KASUS PADA UMKM DI KOTA YOGYA

Disusun Oleh : **ZULIA DIAN FAUZIA**

Nomor Mahasiswa : **16312206**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 08 September 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Muqodim,Drs.,M.B.A., Ak. .....

Penguji : Johan Arifin,,S.E., M.Si., Ph.D.

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam kepada junjungan Rasulullah SAW dan para sahabat yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Skripsi ini diberi judul **"Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Perubahan Tarif Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Tingkat Kepatuhan Pajak, dan Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Yogyakarta)".** Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagaik pihak, oleh karena itu tak lupa dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan-Nya dalam hal kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Surasmanta dan Ibu Isti Sri W selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi dan segala fasilitas yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

3. Bapak Muqodim Drs., M.B.A., Ak selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingan dan saran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh dosen prodi akuntansi yang telah memberikan ilmunya selama penulis berkuliah
5. Muhammad Aji Prasetyo sebagi adik penulis yang selalu mengiatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini
6. Hikmah dan Ridani sebagai teman sebimbingan penulis. Terimakasih telah membantu penulis pada saat kesulitan menyusun skripsi ini
7. Rosita Dewi dan Anindita Tesya yang membantu dalam proses pengolahan data guna penulisan skripsi ini
8. Zidan, Mas Rosyid, Faraz, Findi, Jia, Mbak Runi. Terimakasih telah memberikan pembelajaran, pengalaman, kenangan yang berharga selama KKN di Dusun Jatirogo, Klaten, Jawa Tengah
9. Teman-teman "Gabuters" Sekar, Anggie, Talitha, Tika, Shinta, Muna, Vira, Nisa, Priska, Pavita yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis
10. Hayu, Kharisma, Farah. Terima kasih telah menjadi teman penulis sejak awal perkuliahan dan selalu memberikan dukungan untuk penulis
11. Seluruh responden yang telah bersedia mengisi kuesioner penelitian penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran yang bersifat

membangun untuk dapat diperbaiki pada penelitian selanjutnya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk berbagai pihak.

Penulis,

Zulia Dian Fauzia

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i
Halaman Judul ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme iii
Halaman Pengesahan iv
Berita Acara Ujian Skripsi v
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiii
ABSTRAK xivv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Manfaat Penelitian 9
1.5 Sistematika Penulisan 10
BAB II 12
KAJIAN PUSTAKA 12
2.1 Landasan Teori 12
2.1.1 Teori Perilaku Terencana 12
2.1.2 Teori Atribusi 13
2.1.3 Teori Pembelajaran Sosial 15
2.1.4 Pengertian pajak 16
2.1.5 Penerimaan Pajak 17
2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 17
2.1.7 Perubahan Tarif Pajak UMKM 19
2.1.8 Kualitas Pelayanan Fiskus 20

2.1.9 Sosialisasi Pajak 21
2.1.10 Kepatuhan Pajak 22
2.1.11 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak 24
2.2 PenelitianTerdahulu 25
2.3 Hipotesis Penelitian 31
2.3.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak UMKM 31
2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak UMKM ... 32
2.3.3 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak UMKM 34
2.3.4 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak UMKM 35
2.3.5 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Penerimaan pajak UMKM 36
2.4 Kerangka Konseptual 38
BAB III 39
METODE PENELITIAN 39
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 39
3.2 Sumber Data 39
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 40
3.4 Metode Analisis Data 46
3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 46
3.4.2. Uji Kualitas Data 46
4.1.4 Uji Asumsi Klasik 47
3.4.4. Analisis Regresi Berganda 49
3.4.5. Uji Koefisien Determinasi 50
3.4.6. Uji t (Parsial) 50
3.4.7. Pembahasan 51
4.1 Gambaran Responden 52
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha 52
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha 53
4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan 54

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Omset Usaha 54
4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Peredaran Bruto Setahun ... 55
4.2 Statistik Deskriptif 55
4.3 Analisis Uji Kualitas Data 59
4.3.1 Uji Validitas 59
4.3.2 Uji Reliabilitas 60
4.4 Analisis Pengujian Uji Asumsi Klasik 61
4.4.1. Uji Normalitas 61
4.4.2. Uji Multikolinearitas 62
4.4.3. Uji Heteroskedastisitas 63
4.5 Analisis Regresi Berganda 65
4.6 Analisis Pengujian Uji Koefisien Determinasi 67
4.7 Uji t (Parsial) 67
4.8 Pembahasan 71
BAB V 80
KESIMPULAN DAN SARAN 80
5.1 Kesimpulan 80
5.2 Keterbatasan Penelitian 81
5.3 Implikasi Penelitian 82
5.4 Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 84
LAMPIRAN 91

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu 25
Tabel 4. 1 Data Sektor Usaha 53
Tabel 4. 2 Data Lama Usaha 53
Tabel 4. 3 Data Jumlah Karyawan 54
Tabel 4. 4 Data Omset Usaha 55
Tabel 4. 5 Data Peredaran Bruto 55
Tabel 4. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif 56
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas 59
Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas 61
Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas 62
Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas 63
Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas 64
Tabel 4. 12 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 65
Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi 67
Tabel 4. 14 Hasil Uji t Statistik 68
Tabel 4. 15 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 *Theory Planned and Behaviour*..... 13
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual 38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1 Data Responden..... 92
Lampiran2 Data Sampel Variabel Penerimaan Pajak 96
Lampiran3 Data Sampel Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus..... 99
Lampiran4 Data Sampel Variabel Sosialisasi Pajak 102
Lampiran5 Data Sampel Variabel Perubahan Tarif Pajak 105
Lampiran6 Data Sampel Variabel Tingkat Kepatuhan Pajak 108
Lampiran7 Data Sampel Variabel Pengetahuan dan Pemahamaan Pajak 111
Lampiran8 Hasil Uji Statistik Deskriptif 114
Lampiran9 Hasil Uji Validitas 117
Lampiran10 Hasil Uji Reliabilitas 123
Lampiran11 Hasil Uji Normalitas dan Uji Koefisien Determinasi..... 125
Lampiran12 Hasil Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas 126
Lampiran13 Hasil Uji Regresi dan Uji t 127
Lampiran14 Surat Permohonan Izin Penelitian 128
Lampiran15 Kuesioner..... 129

ABSTARCT

This research aims to analyze the impact of the quality of fiscus service, tax socialization, changes in tax rates, tax compliance, knowledge and understanding of taxpayers towards tax revenue of Micro, Small, and Medium enterprises (MSME). This research uses quantitative research methods by using questionaire. The sample of this research was 100 respondents MSME taxpayers in Yogyakarta city region.

The results of this research show that the quality of fiscus service partially has no effect on tax revenue of MSME; Tax socialization, Tax compliance, Knowledge and Understanding of Taxpayers partially have a positive effect on Tax Revenue of MSME; and Changes in Tax Rates have a negative effect on Tax revenue of MSME

***Keywords**: MSME, Tax Revenue, Changes in tax rate*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, perubahan tarif pajak dalam PP No 23 Tahun 2018, Tingkat Kepatuhan Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden Wajib Pajak UMKM di Wilayah Kota Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkann bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak UMKM; Sosialisasi Pajak, Tingkat kepatuhan Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak UMKM; dan Perubahan Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak UMKM

Kata Kunci: UMKM, Penerimaan Pajak, Perubahan Tarif Pajak

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007). Bagi negara, pajak mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai fungsi mengatur dan fungsi budgetair.

Sebagai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2017). Sedangkan sebagai fungsi *budgetair*, pajak merupakan sumber penerimaan APBN yang memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini karena sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berasal dari pajak. Hampir 70% penerimaan negara mengandalkan pajak, lalu sisanya merupakan penerimaan dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Oleh karena itu, pajak memegang peranan penting dalam kesejahteraan bangsa (kemenkeu.go.id).

Sumber-sumber penerimaan pajak yang dikelola pemerintah pusat berasal dari berbagai jenis pajak antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Dalam

struktur penerimaan pajak di Indonesia jenis pajak yang memiliki kontribusi paling dominan adalah pajak penghasilan. Dalam laporan realisasi APBN 2018 Kementerian Keuangan mencatat pajak penghasilan yang dapat dihimpun sebesar 686,80 triliun atau sekitar 52% dari total penerimaan pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima selama satu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 penghasilan yang dikenakan atau yang menjadi objek pajak adalah setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Salah satu sumber atau penyumbang penerimaan pajak penghasilan adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh pelaku usaha UMKM

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 1 disebutkan bahwa UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh perorangan ataupun badan dengan kriteria usaha tertentu. Data dari laman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang terdaftar mencapai 52,92 juta unit atau 99 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional. (pajak.go.id).

Namun demikian, hingga saat ini kontribusi sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak masih terbilang minim. Setiap tahunnya, setoran pajak dari sektor UMKM hanya berkisar 4-5 triliun saja. Data menunjukkann kontribusi UMKM yang membayar pajak di tahun 2015 sebesar Rp 3,5 triliun. Angkanya meningkat di tahun 2016 dengan setoran pajak sejumlah Rp 4,3 triliun. Pada tahun 2017 tercatat setoran pajak UMKM sebesar Rp 5,8 triliun. Dan pada tahun 2018 Direktorat Jenderal pajak mencatat penerimaan pajak dari sektor UMKM sebesar Rp 5,7 triliun.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya 1,5 juta UMKM yang tercatat sebagai pembayar pajak, padahal jumlah UMKM di Indonesia mencapai 52,92 juta pelaku. Untuk itu Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak terus mengupayakan menggali potensi penerimaan pajak UMKM dengan menciptakan sistem perpajakan yang ramah bagi UMKM

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013 dan diberlakukan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) ≤ Rp 4,8 M per tahun.Wajib Pajak jenis ini dikenakan tarif pajak final 1% dari peredaran bruto. PP No 46/2013 ini memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak berupa penyederhanaan perhitungan pajak terutang, pelaporan, dan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM untuk mendorong pemenuhan

perpajakan secara sukarela sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Setelah berjalan beberapa tahun kebijakan PP No 46/2013 tersebut masih dianggap berat oleh pelaku usaha/UMKM, terlebih oleh pelaku UMKM yang masih baru. Besarnya biaya-biaya usaha yang dikeluarkan oleh UMKM serta biaya kebutuhan lain membuat keuntungan yang diterima oleh para pelaku usaha tidaklah cukup untuk membayar kewajiban pajak. Hal inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan untuk lebih merangkul dan memfasilitasi UMKM untuk lebih berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

Pada tahun 2018, pemerintah melakukan perubahan kebijakan terkait dengan pajak penghasilan bagi pelaku UMKM. Perubahan ini tertuang dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berlaku mulai Juli 2018. Adapun perubahan kebijakan ini terkait dengan penurunan besaran tarif sebelumnya 1% menjadi 0,5% dari penghasilan bruto yang diterima. Tujuan pemangkasan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5% ini adalah untuk meringankan wajib pajak UMKM dalam hal pembayaran pajaknya.

Setelah penerapan kebijakan ini dari data Kementerian Keuangan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 tercatat mencapai Rp 5,7 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,7% dari tahun sebelumnya. Begitu pula di tahun 2019 pemerintah mencatat

terjadinya penurunan penerimaan pajak sektor UMKM sekitar 15.08%, di tahun tersebut penerimaan pajak tercatat hanya mencapai Rp 4,84 triliun. Artinya setelah penurunan tarif pajak tersebut penerimaan pajak UMKM masih mengalami penurunan.

Di sisi lain dalam hal pertumbuhan jumlah waijb pajak setelah penerapan PP No 23/2018 ini, pemerintah mencatat adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak.Adapun jumlah wajib pajak yang membayar pajak lewat PP No.23/2018 di tahun 2019 mencapai 2,3 juta wajib pajak. Jumlah wajib pajak tersebut meningkat 27% dari periode 2018 yang hanya tercatat 1,8 juta wajib pajak. (ddtc.com).

Beberapa penelitian tentang penerimaan pajak telah dilakukan oleh peneliti seperti Mahendra dan Sukartha (2014); Cahyono (2017); Fadhilah (2018); Suyanto dan Yahya (2019); Nainggolan dan Pinem (2019). Dengan menggunakan variabel independen kepatuhan pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, *tax evasion*, *self assesment*, kesadaran pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak.

Penelitian yang dilakukan Mahendra dan Sukartha (2014) variabel independen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan di KPP Badung Utara dengan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear

berganda dengan hasil penelitian yaitu secara parsial kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Penelitian yang dilakukan Cahyono (2017) variabel independen yang digunakan yaitu *tax evasion*, tingkat kepatuhan wajib pajak, *self assesment system*, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, persepsi kualitas pelayanan. Objek penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Surakarta dengan menggunakan sumber data primer. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, hasilnya menunjukkan bahwa variabel *tax evasion*, tingkat kepatuhan wajib pajak, *self assesment system*, kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan variabel persepsi kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Penelitian yang dilakukan Fadhilah (2018) variabel independen yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Medan Timur dengan sumber data primer. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda, hasilnya menunjukkann bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan pajak tidak berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Yahya (2019) variabel independen yang digunakan yaitu sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak. Objek penelitian yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Wonosari dengan sumber data primer. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda, dengan hasil menunjukkann secara parsial sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Pinem (2019), menggunakan variabel independen yaitu sosialisasi pajak, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Objek penelitian yang digunakan adalah wajib pajak badan di KPP Madya Medan dengan sumber data primer. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda, hasilnya menunjukkann bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan secara parsial sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas masih terdapat beberapa variabel yang belum konsisten hasilnya, seperti variabel kepatuhan pajak dalam penelitian Mahendra dan Sukartha (2014) kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan pada penelitian Cahyono (2017); Fadhilah (2018); Nainggolan dan Pinem (2019) kepatuhan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. variabel sosialisasi pajak pada penelitian Suyanto dan Yahya (2019) hasilnya berpengaruh terhadap penerimaan pajak sedangkan pada penelitian Nainggolan dan Pinem (2019) sosialisasi pajak

tidak berpengaruh. Selain itu, mayoritas penelitian yang dilakukan menggunakan objek penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan yang membayarkan pajak penghasilan secara keseluruhan. Sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali variabel kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, tingkat kepatuhan pajak, perubahan tarif pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib, penelitian iniberfokus pada objek penelitian wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan sektor UMKM yang terdapat di Kota Yogyakarta. Pemilihan ini disebabkan Kota Yogyakarta merupakan kota pariwisata berpotensi memiliki banyak UMKM dan memungkinkan tingginya penerimaan pajak UMKM di kota ini. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **"Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Perubahan Tarif Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Tingkat Kepatuhan Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Yogyakarta"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas pelayanan fiskus memengaruhi penerimaan pajak UMKM?
2. Apakah sosialisasi pajak memengaruhi penerimaan pajak UMKM?
3. Apakah perubahan tarif pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 memengaruhi penerimaan pajak UMKM?

4. Apakah tingkat kepatuhan pajak memengaruhi penerimaan pajak UMKM?
5. Apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak memengaruhi penerimaan pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menentukantujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskusterhadap penerimaan pajak UMKM
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak UMKM
3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap penerimaan pajak UMKM
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak UMKM
5. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa kalangan sebagai berikut.

1. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap

penerimaan pajak pelaku UMKM dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para praktisi perpajakan (pemerintah) untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak UMKM. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi agar dapat memberikan sosialisasi dan upaya perpajakan UMKMlainnya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak UMKM

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab. Adapun isi dari masing-masing bab tersebut yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori dari permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang dilakukan seperti populasi dan sampel penelitian, sumber dan metode pengambilan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji t kemudian dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana

Ajzen (1991) menjelaskan bahwa teori perilaku terencana atau *Theory of Planed Behavior* adalah teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku.

Munculnya niat berperilaku dapat ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Menurut Ramdhani (dalam Kusumawati, 2018) 3 faktor dalam *Theory of Planned Behavior* antara lain:

1. Attitude towards the behaviour

   Sikap dari suatu perilaku ditentukan oleh konsekuensi dari suatu perilaku, atau secara singkat disebut keyakinan-keyakinan perilaku *(behavioral beliefs).* Pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya dilakukan dengan dikaitkan perilaku tertentu dengan manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh apabila individu tersebut melakukan atau tidak melakukannya.

2. Subjective norm (Norma Subjektif)

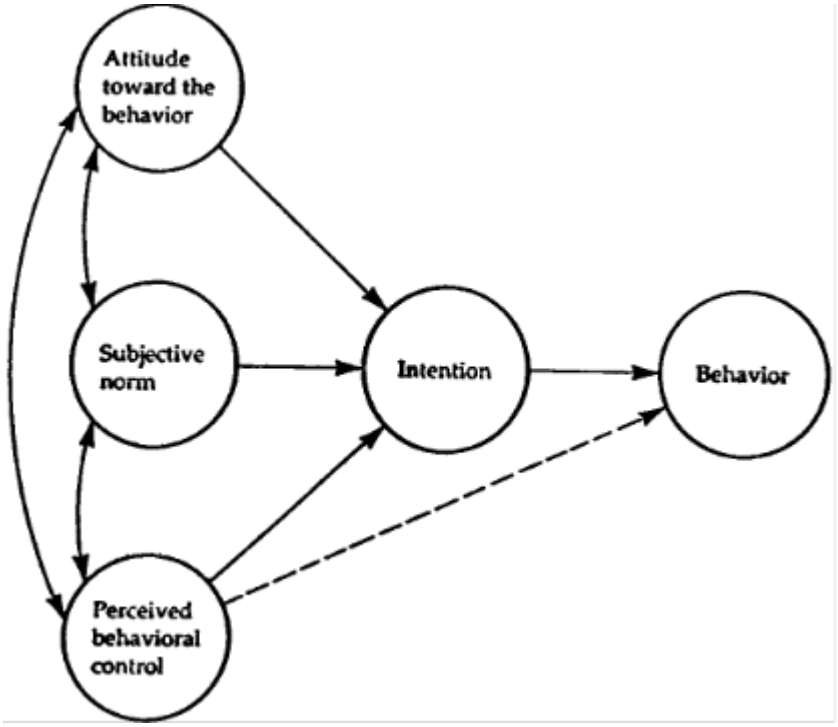
   Norma sosial (*Subjective Norm/Normative Beliefs*) yang memiliki dampak terhadap perilaku seseorang dikarenakan norma sosial

dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang sekitar yang dianggap penting.

3. Perceived behaviour control (Persepsi Kontrol Perilaku)

Persepsi kontrol perilaku adalah persepsi seseorang yang berkaitan dengan mudah atau tidaknya mewujudkan suatu perilaku.

Penjelasan mengenai teori perilaku terencana dapat digambarkan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2. 1

***Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991)**

2.1.2 Teori Atribusi

Teori atribusi mengasumsikan bahwa seseorang mencoba untuk menentukan mengapa orang lain melakukan apa yang mereka lakukan.

Seseorang harus melihat atau mengamati suatu perilaku. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal Robbins (dalam Jatmiko, 2006).

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (dalam Jatmiko 2006) tergantung pada tiga faktor yaitu :

1. Kekhususan

   Seseorang akan mempersepsikan perilaku orang lain berbeda dalam situasi yang berlainan. Bila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, individu lainyang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku individu yang sedang diamati. Sebaliknya jika pengamat menganggap hal itu biasa, maka ia akan memberikan atribusi internal

2. Konsensus

   Dalam situasi yang sama seseorangmemlikipandangan yang sama terhadap perilaku orang lain. Jika nilai konsensusnya tinggi, maka akan memberikan atribusi internal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, maka memberikan atribusi eksternal

3. Konsistensi

   Seseorang akan merespon perilaku orang lain sama dari waktu ke waktu. Semakin konsistensi perilaku tersebut, makaorang

atau individu pengamat akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya.

2.1.3 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial merupakan teori yang dikemukan oleh Albert Bandura (dalam Laila, 2015). Teori pembelajaran sosial adalah teori yang dilakukan melalui peniruan. Menurut Bandura tahap-tahap dalam pembelajaran sosial sebagai berikut:

1. Tahap Perhatian *(Attentional Phase)*

   Tahap perhatian merupakan tahap di mana seseorang memusatkan perhatian pada objek atau perilaku model.

2. Tahap penyimpanan dalam ingatan *(Retention Phase)*

   Pada tahap ini informasi berupa materi dan contoh perilaku model itu ditangkap, diproses dan disimpan dalam memori

3. Tahap reproduksi *(Reproduction Phase)*

   Tahap ini, segala bayangan atau citra mental (imagery) atau kode-kode simbolis yang berisi informasi pengetahuan dan perilaku yang telah disimpan dalam memori diproduksi kembali. Menampilkan penampilan yang sebenarnya dari tingkah laku yang baru diamati.

4. Tahap motivasi *(Motivasion Phase)*

   Tahap terakhir dalam proses terjadinya peristiwa atau perilaku belajar adalah tahap penerimaan dorongan yang dapat

berfungsi sebagai *reinforcement* (penguatan). Fase ini merupakan fase si pengamat akan termotivasi untuk meniru model.

2.1.4 Pengertian pajak

Pajak menurut Rochmat Soemitro (dalam Resmi, 2017:1), adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus akan digunakan untuk membiayai *public investment*

2.1.5 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan atau pendapatan yang diterima negara dari pemungutan pajak. Penerimaan pajakini berasal dari berbagai kategori pajak antara lain pajak penghasilan sektor migas dan non-migas, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi bangunan, dan cukai. Dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah guna meningkatkan kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dan tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan, maka setiap tahunnya Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak (Rahayu dalam Mahendra dan Sukartha, 2014). Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain pemerintah secara gencar telah melakukan reformasi perpajakan yang mencakup beberapa pilar yaitu SDM, teknologi informasi, proses bisnis, organisasi, dan regulasi pajak. (liputan6.com).

2.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No 23 Tahun 2018) tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang

diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini berlakumulai 1 Juli 2018.

PP No 23/2018 mengatur beberapa poin ketentuan pemberlakuan peraturan tersebut yaitu:

1) Pengenaan tarif 0,5% bersifat opsional. Wajib pajak dapat memilih dikenakan tarif mengikuti skema tarif 0,5%, atau berdasarkan tarif pasal 17, atau pasal 31 E Undang-Undang Pajak penghasilan. Sifat opsional ini memberikan keuntungan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang belum menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, sehingga pilihan tarif 0,5% akan memberikan kemudahan wajib pajak dalam menghitung kewajiban pajaknya.
2) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final diatur dalam pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
   a. 7 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
   b. 4 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan;
   c. 3 Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas
3) Batas penghasilan yang dikenakan tarif dalam peraturan ini tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam masa satu tahun pajak
4) Wajib pajak yang dapat dikenakan tarif dalam peraturan ini yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk

Koperasi, CV, firma atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000

2.1.7 Perubahan Tarif Pajak UMKM

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase (%) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam suatu kebijakan penetapan tarif pajak. Menurut Resmi (2017), jenis tarif pajak di bedakan menjadi tarif tetap yaitu tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya pengenaan pajak. Di Indonesia pengenaan pajak dengan tarif tetap diterapkan pada bea materai. Kemudian tarif proporsional berupa persentase (%) tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, maka semakin besar pula jumlah pajak terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Dan tarif progresiftarif berupa persentase (%) tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif ini misalnya diterapkan dalam pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Tarif Pajak UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu merupakan tarif pajak tunggal yang pengenaannya bersifat final sebesar 1%. Pada bulan Juli 2018 pemerintah menerbitkan peraturan baru sebagai pengganti PP No 46/2013 yaitu PP No 23/2018 dengan

kebijakan tarif pajaknya 0,5%. Penurunan tarif pajak UMKM ini dilakukan dengan harapan dalam jangka panjang sektor UMKM dapat berkembang dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang berkontribusi membayarkan pajaknya kepada negara. Tarif 0,5% ini merupakan keuntungan bagi wajib pajak UMKM karena pajak yang dibayarkan relatif kecil dan tidak memberatkan wajib pajak

2.1.8 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani dan membantu menyiapkan (mengurus) sesuatu yang diperlukan seseorang. Menurut Kotler dalam Ariani, (2018) pelayanan adalah semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain suatu tindakan atau kinerja yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Sementara fiskus adalah petugas pajak atau pegawai pajak. Sehingga dapat diartikan bahwa pelayanan fiskus adalah suatu tindakan yang dilakukan fiskus atau petugas pajak kepada orang lain dalam hal ini wajib pajak untuk membantu tercapainya tujuan dalam pemenuhan kebutuhan

Secara umum kualitas pelayanan adalah suatu proses, aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau penyedia jasa yang dikerjakan untuk memenuhi harapan pelanggan. Sehingga dapat diartikan kualitas pelayanan fiskus adalah tindakan yang dilakukan fiskus atau petugas pajak dalam membantu memenuhi kebutuhan sesuai dengan harapan wajib pajak.

Menurut Parasuraman dalam Putriani dan Budiartha (2016), ada lima aspek agar kualitas pelayanan dapat memberikan kepuasan bagi pengguna jasa dalam hal ini adalah Wajib Pajak yang meliputi (1) *Reliability* (keandalan), (2) *Assurance* (jaminan), (3) *Empaty* (empati), (4) *Responsieveness* (ketanggapan), dan (5) *Tangible* (bukti langsung). Pelayanan pajak dianggap berkualitas apabila memberikan fasilitas yang nyaman, pelayanan yang memuaskan, memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, fiskus yang kompeten, sopan, dan dapat dipercaya. Pelayanan pada wajib pajak yang berkualitas bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang nantinya diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.9 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses belajar seseorang melaluiinteraksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Setiawan dan Daroini dalam Suyanto dan Yahya, 2013). Sosialisasi pajak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan petugas pajak untuk memberitahukan informasi perpajakan yang belum diketahui untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, ketrampilan dan sikap wajib pajak agar terdorong untuk lebih patuh dan sadar memenuhi kewajiban pajaknya

Sosialisasi perpajakan dinilai sangat penting karena wajib pajak perlu tahu tentang peraturan pajak wajib Pajak juga harus tahu bagaimana

cara dirinya harus membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat dan sebab penghasilan tersebut. Petugas pajak perlu melakukan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan

Dalam rangka mencapai tujuan dari kegiatan penyuluhan yaitu masyarakat yang paham dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya, maka perlu dilakukan kegiatan sosialisasi yang terencana sehingga kegiatan sosialisi menjadi suatu proses yang terstruktur, terarah, terukur, dan berkesinambungan. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Menurut Oktavino (dalam Tyas, 2019) sosialisasi dapat dilakukan dengan cara seperti publikasi melalui media cetak maupun media elektronik, kegiatan sosialisasi yang melibatkan institusi pajak dan wajib pajak, pemberitahuan dalam bentuk berita, keterlibatan komunitas, maupun melalui pendekatan secara pribadi.

2.1.10 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan taat dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya (KBBI). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Nainggolan dan Pinem, 2019). Menurut Siti Kurnia

Rahayu dalam Wahda, Bagianto, Yuniati (2018) Kepatuhan pajak dibagi menjadi 2 yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material

1. Kepatuhan pajak formal merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan sebelum batas tanggal penyampaian tanpa memperhatikan kebenaran dari SPT tersebut
2. Kepatuhan pajak material merupakan suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakikat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut

Menurut Keputusan Menteri No. 544/KMK.04/2000 kriteria wajib pajak patuh antara lain:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dalam waktu 2 tahun terakhir
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali apabila memiliki izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena telah melakukan tindak pidana di bidang pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak terutang paling banyak 5%
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.

2.1.11 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Secara umum pengetahuan dapat dimaknai sebagai segala sesuatu atau segala informasi yang diketahui dan disadari, sedangkan pemahaman menurut Benyamin S. Bloom (dalam Primandani, Syafi'i, Haryono, 2017) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dalam kaitannya penelitian ini pengetahuan dan pemahaman wajib pajak diartikan dengan diketahui dan dimengertinya semua hal yang berkaitan dengan perpajakan secara baik dan benar oleh Wajib Pajak. Pengetahuan dan pemahaman pajak digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, sikap terhadap hak dan kewajiban perpajakannya.

Penting untuk wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara membayar pajak dan melaporkan SPT (Dewi dan Widuri dalam Cahyono, 2017). Selain itu wajib pajak juga perlu memahami

sistem perpajakan, maupun sanksi perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak memiliki peran dalam menentukan kesadaran untuk membayar pajak. Menurut Eddy dalam Ariani (2018) wajib pajak yang tahu akan peraturan dan tata cara pembayaran pajak dengan benar akan cenderung memenuhi kewajibannya dalam pajak

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan dapat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun nonformal. Pendidikan perpajakan secara formal didapatkan materi di sekolah hingga perguruan tinggi sedangkan pendidikan nonformal didapatkan melalui sosialisasi, seminar, spanduk ataupun media lainnya seperti sosial media, iklan, dan website resmi Direktorat Jenderal Pajak.

2.2 PenelitianTerdahulu

Penelitian terdahulu mengenai penerimaan pajak telah diteliti olehbeberapa peneliti sebelumnya, seperti tampak dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2 1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Alat Analisis	Hasil
1.	Mahendra dan Sukartha (2014)	**Variabel Independen** • Kepatuhanwajib pajak • Pemeriksaan pajak • Penagihan pajak **Variabel Dependen** Penerimaan Pajak	Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara	Analisis regresi linear berganda	Secara parsial kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajakberpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Alat Analisis	Hasil
		Penghasilan Badan			
2.	Nangka, Sabijono, dan Tangkuman (2014)	**Variabel Independen** • Pengetahuan Wajib Pajak Badan **Variabel Dependen** • Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Analisis regresi linear sederhana	Pengetahuan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak penghasilan Badan
3.	Alfian, Rahmat (2015)	**Variabel Independen** • Tingkat kepatuhan Wajib Pajak **Variabel Depeden** • Penerimaan Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan	Analisis regresi linier sederhana	Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak orang pribadi
4.	Manengkey, Pangemanan dan Pontoh (2015)	**Variabel Independen** • Pemahaman atas PP Nomor 46 Tahun 2013 **Variabel Dependen** • Penerimaan Pajak Penghasilan	Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto kurang 4,8 milliar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu	Analisis regresi sederhana	Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan
5.	Widiawati dan Mita (2016)	**Variabel Independen** • Kesadaran Wajib Pajak • Kepemilikan	Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha	Analisis regresi berganda	• Secara parsial kesadaran wajib pajak, kepemilikan NPWP, penagihan pajak berpengaruh

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Alat Analisis	Hasil
		NPWP • Pelayanan Fiskus • Penagihan Pajak **Variabel Dependen** • Penerimaan Pajak Wajib Pajak kegiatan usaha dan pekerjaan bebas	atau pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri		positif terhadap penerimaan pajak wajib pajak kegiatan usaha dan pekerjaan bebas • Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak wajib pajak kegiatan usaha dan pekerjaan bebas
6.	Damayanti, Suhadak, dan Pamungkas (2016)	**Variabel Independen** • Tingkat inflasi • *Economic growth* • Tingkat tarif pajak **Variabel Dependen** • Penerimaan pajak	Pajak di negara-negara Asia	Analisis regresi berganda	• Secara parsial tingkat inflasi, *economic growth*, tingkat tarif pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak
7.	Amanah dan Rustam (2016)	**Variabel Independen** • Sosialisasi perpajakan • Kepemilikan NPWP • Pemeriksaan Pajak **Variabel Dependen** • Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pengusaha	Petugas pajak (fiskus) yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan	Analisis regresi berganda	• Secara parsial sosialisasi perpajakan dan kepemilikan NPWP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pengusaha • Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pengusaha
8.	Suyanto dan Yahya (2016)	**Variabel Independen** • Sosialisasi	Pegawai Kantor Pelayanan	Analisis regresi berganda	• Secara parsial sosialisasi perpajakan dan

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Alat Analisis	Hasil
		perpajakan • Ekstensifikasi pajak **Variabel Dependen** • Penerimaan Pajak penghasilan orang pribadi	Pajak Pratama Wonosari		ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi
9.	Putriani dan Budiartha (2016)	**Variabel Independen** • Penyuluhan Perpajakan • Pelayanan Fiskus **Variabel Dependen** • Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur	Analisis regresi linear berganda	• Secara parsial penyuluhan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan badan
10.	Yuspitara, Susena dan Herlin (2017)	**Variabel Independen** • Penagihan Pajak dengan surat paksa **Variabel Dependen** • Penerimaan pajak badan	Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur	Analisis regresi linier sederhana	Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
11.	Cahyono (2017)	**Variabel Independen** • *Tax Evasion* • Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak • *Self Assessment System* • Kesadaran Wajib Pajak	Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta	Analisis regresi berganda	• Secara parsial *Tax evasion*, tingkat kepatuhan wajib pajak, self assesment system, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Alat Analisis	Hasil
		• Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Perpajakan • Persepsi Kualitas Pelayanan **Variabel Dependen** • Penerimaan Pajak			perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak • Persepsi kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak
12.	Astuti dan Panjaitan (2017)	**Variabel Independen** • *e-faktur* • Pengetahuan Pajak **Variabel Dependen** • Penerimaan Pajak **Variabel Moderasi** • Kepatuhan Wajib Pajak	Wajib Pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter	*Path Analysis*	• Secara parsial *E-faktur* danpengetahuan pajakmemiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. • Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh negatif dalam pemoderasian *e-faktur* terhadap penerimaan pajak. • Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel moderasi memiliki pengaruh negatif dalam pemoderasian pengetahuan pajak terhadap penerimaan pajak
13.	Muhammad dan Sunarto (2018)	**Variabel Independen** • Pemeriksaan Pajak • Penagihan Pajak	Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan	Analisis regresi linier berganda	• Secara parsial pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Alat Analisis	Hasil
		• Kepatuhan Wajib Pajak **Variabel Dependen** • Penerimaan Pajak	Pajak Pratama Raba Bima		penerimaan pajak • Penagihan pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak
14.	Fadhillah (2018)	**Variabel Independen** • Kesadaran Wajib Pajak • Pelayanan Perpajakan • Kepatuhan Wajib Pajak **Variabel Dependen** • Penerimaan Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Analisis regresi berganda	• Secara parsial kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak • Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak
15.	Manna, Rosnawintang, Nusantara (2018)	**Variabel Independen** • Pemerikasaan pajak • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) • Tarif Pajak • Penerbitan Surat Paksa **Variabel Dependen** • Penerimaan pajak penghasilan	Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Kendari	Analisis regresi berganda	• Secara parsial pemeriksaan pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan • Secara parsial Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penerbitan surat paksa berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan
16.	Wahidah (2018)	**Variabel Independen** • Tax Amnesty • Pertumbuhan Ekonomi • Kepatuhan	Wajib Pajak Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan	Analisis Berganda	• Secara parsial Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Objek Penelitian	Alat Analisis	Hasil
		Wajib Pajak **Variabel Dependen** • Penerimaan Pajak	Pekanbaru		Pajak
16.	Nainggolan dan Pinem (2019)	**Variabel Independen** • Sosialisasi pajak • Sanksi pajak • Kepatuhan wajib pajak **Variabel Dependen** • Penerimaan pajak	Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan	Analisis regresi linier berganda	• Secara parsial sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak • Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak

Sumber: Data Sekunder, diolah

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak UMKM

Kualitas pelayanan fiskus adalah tindakan yang dilakukan fiskus atau petugas pajak dalam membantu memenuhi kebutuhan sesuai dengan harapan wajib pajak. Pelayanan fiskus terjadi melalui interaksi antara wajib pajak dengan petugas pajak. Pelayanan fiskus dikatakan berkualitas apabila membentuk suatu kesan baik. Apabila wajib pajak menganggap pelayanan fiskus memberikan fasilitas yang nyaman, pelayanan yang memuaskan, memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, fiskus yang kompeten, sopan, dan dapat dipercaya menjadikan banyak wajib pajak UMKM yang merasa senang dan puas atas pelayanan yang diberikan.

Teori yang berkaitan dengan hipotesis ini adalah teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau internal. Dalam teori atribusi, seseorang yang menjadi pengamat akan memberikan atribusi eksternal apabila individu lain berperilaku luar biasa. Dengan adanya pelayanan fiskus yang berkualitas wajib pajak akan merasa terbantu dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak terutangnya. Wajib pajak akan memberikan respon atau penilaian positif terhadap fiskus sehingga hal tersebut mendorong kemauan untuk membayar pajak. Oleh karena itu semakin baik atau berkualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka penerimaan pajak semakin meningkat.

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian Cahyono (2017) dan Fadhilah (2018) bahwa variabel pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak UMKM

2.3.2 Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak UMKM

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktur Jenderal Pajak (DJP) dan khususnya kantor pelayanan pajak, untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu

yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Teori yang berkaitan dengan hipotesis ini adalah teori pembelajaran sosial yang dikemukakan oleh Bandura (1971). Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa terdapat hubungan antara individu dan lingkungannya. Seseorang akan mendapatkan pengetahuan perpajakannya melalui interaksi dengan lingkungannya. Dengan adanya sosialisasi pajak yang dilakukan oleh KPP setempat dan pembinaan oleh petugas pajak, seorang wajib pajak akan melakukan proses pembelajaran dengan melakukan peniruan sikap atau perilaku melalui rekan sesama wajib pajak dan petugas pajak yang memberikan sosialisasi.

Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak akan menimbulkan dorongan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Sehingga apabila semakin tinggi sosialisasi pajak, semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk membayar, maka semakin tinggi pula penerimaan negara di sektor pajak UMKM

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian yang dilakukanSuyanto dan Yahya (2019), sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Oleh karena itu, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sosialisasi Pajak Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak UMKM

2.3.3 Pengaruh Perubahan TarifPajakterhadap Penerimaan Pajak UMKM

Tarif pajak biasanya berupa persentase (%) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam suatu kebijakan penetapan tarif pajak. Tarif pajak digunakan untuk menghitung pajak yang terutang atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.

Perubahan tarif adalah kenaikan ataupun penurunan persentase tarif pajak. Dalam PP No 23/2018 diberlakukan tarif 0,5% yang bersifat final untuk penghasilan dengan peredaran tertentu. Semula, tarif yang diberlakukan adalah tarif menurut PP No 46/2013 yaitu 1%. Perubahan tarif ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak yang di bayarkan oleh wajib pajak, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan pemenuhan perpajakan secara sukarela.

Dalam kaitannya teori ekonomi apabila harga suatu produk di pasar mengalami penurunan maka akan terjadi penurunan pula dalam hal penerimaan. Hal ini juga terjadi dalam perpajakan dari penurunan tarif pajak UMKM tersebut pemerintah mencatat terjadinya penurunan penerimaan pajak. Oleh karena itu, semakin rendah tarif pajak maka penerimaan negara di sektor pajak semakin rendah pula

Hal ini didukung oleh penelitian Manna, Rosnawintang, Nusantara (2018), tarif pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sehingga dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 :Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan pajak UMKM

2.3.4 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak UMKM

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa kepatuhan sebagai sikap tunduk atau taat pada ajaran atau suatu aturan (2018) sehingga menurut Adrianti (dalam Cahyono, 2017) tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketika Wajib Pajak mampu memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Tingkat kepatuhan pajak yang dimaksud antara lain kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam mengisi dan melaporkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutangnya.

Theory of Planned Behaviour relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dalam teori ini terdapat faktor *behavioural belief*syang merupakan suatu keyakinan individu mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Wajib pajak memiliki keyakinan positif bahwa sikap kepatuhan yang dilakukannya akan menguntungkan bagi mereka, sebaliknya niat berperilaku patuh terhadap pajak akan rendah ketika wajib pajak mempersepsikan perilaku kepatuhan pajak akan merugikan. Oleh karena itu, semakin tinggi kepatuhan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak.

Hal ini didukung olehpenelitian Mahendra dan Sukartha (2014); Wahidah (2018) bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif

terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, semakin tinggi pula penerimaan pajak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4: Tingkat Kepatuhan Pajak Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak UMKM

2.3.5 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Penerimaan pajak UMKM

Pengetahuan dan pemahaman pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang di mengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak (Aulinisa, 2018). Pengetahuan dan pemahaman pajak tersebut meliputi pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi pajak, pengetahuan dan pemahaman prosedur pembayaran pajak terutang, pengetahuan dan pemahaman tentang tarif pajak dan sanksi atau denda pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak, semakin tinggi pula kemampuan Wajib Pajak dalam mengikuti aturan-aturan sesuai dengan ketentuan pajak.

Hipostesis ini berkaitan dengan teori atribusi, pengetahuan dan pemahaman pajak termasuk faktor internal dalam teori atribusi, karena pengetahuan merupakan faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bila wajib pajak UMKM mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang mengatur hak dan kewajiban perpajakan UMKM, serta pentingnya kontribusi pajak UMKM yang dibayarkan terhadap negara, maka akan

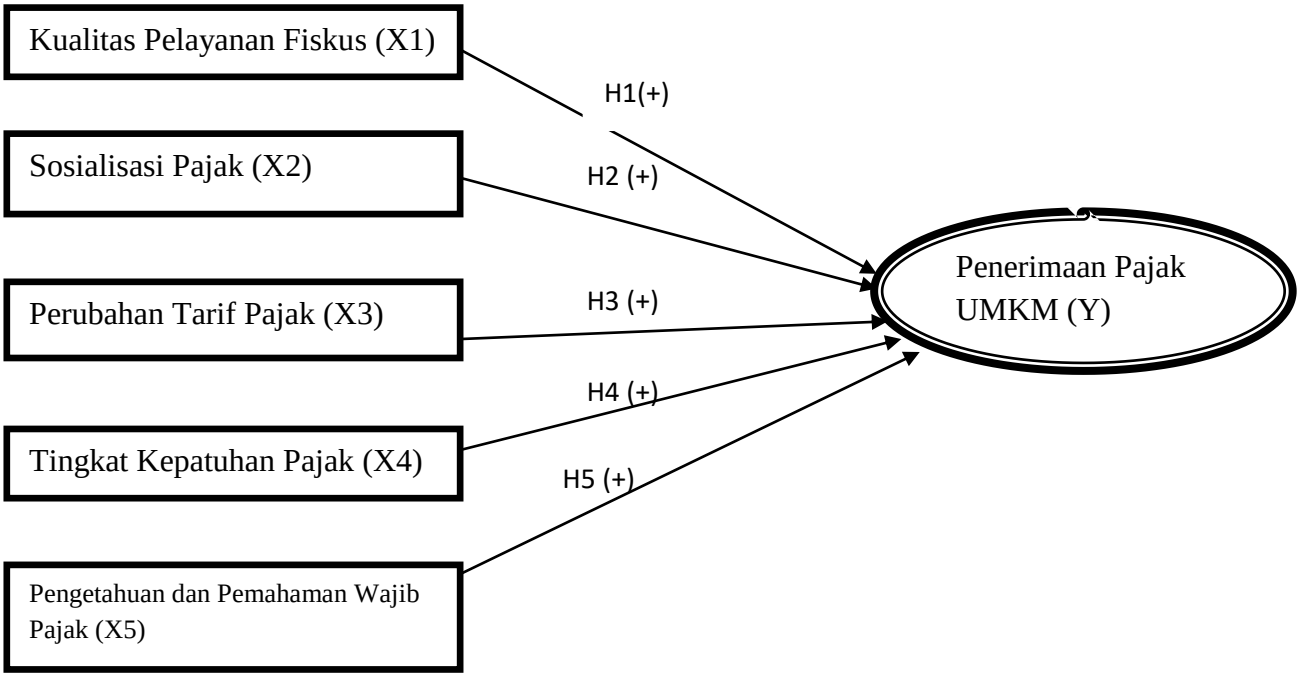
menimbulkan niat atau keinginan untuk membayar pajak. Oleh karena itu semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan negara di sektor pajak

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Manengkey, Pangemanan dan Pontoh (2015), Astuti dan Panjaitan (2017) Pengetahuan dan Pemahaman pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positifterhadap penerimaan pajak UMKM

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan rumusan hipotesis di atas, dapat dirumuskan kerangka konseptual yang ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 2

Kerangka Konseptual

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi maupun badan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Yogyakarta yang berjumlah 23.000 pelaku usaha. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 100 UMKM.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus dari Hair (2010) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 15 sampai 20 kali jumlah variabel independen yang digunakan. Dalam penelitian ini digunakan 5 variabel independen sehingga jumlah sampel minimal yang diambil sejumlah 5 X 20 = 100.

3.2 Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data primer, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner yang dibagikan kepada responden dan wawancara responden. Sejumlah pernyataan ditujukan kepada responden, kemudian responden diminta untuk menjawab pernyataan yang terdapat pada kuesioner tersebut berdasarkan pendapat responden. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala

likert 4 poin yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Setuju (3), Sangat Setuju (4)

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen yaitu penerimaan pajak UMKM, sedangkan 5 (empat) variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, perubahan tarif pajak, tingkat kepatuhan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.

Definisi operasional masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

a) **Penerimaan Pajak UMKM**

Penerimaan pajak UMKM adalah penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pengenaan pajak penghasilan yang diperoleh wajib pajak badan ataupun orang pribadi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak

Dalam penelitian ini digunakan 6 pernyataan sebagai indikator untuk mengukur variabel penerimaan pajak UMKM yang diambil dari penelitian Fadhilah (2018) yang dimodifikasi, indikatornya sebagai berikut:

1. Dengan adanya perubahan tarif PP 23 Tahun 2018 penerimaan pajak dapat meningkat

2. Penundaan pembayaran dan pengurangan pajak dapat merugikan negara
3. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan negara
4. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar
5. Perlunya berbagai upaya agar penerimaan di sektor pajak meningkat
6. Kerjasama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa depan

b) **Kualitas Pelayanan Fiskus**

Kualitas pelayanan fiskus adalah cara melayani, membantu, dan mengurus segala sesuatu yang di butuhkan wajib pajak dari petugas pajak yang memberikan fasilitas yang nyaman, pelayanan yang memuaskan, memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, fiskus yang kompeten, sopan, dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini terdapat 6 pernyataan yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel pelayanan fiskus yang diambil dari penelitian Jatmiko (2006) sebagai berikut:

1. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik
2. Fasilitas yang diberikan kantor pajak sudah memadai
3. Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil
4. Penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantupemahaman mengenai hak dan kewajibanselaku Wajib Pajak

5. Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang dikenakan
6. Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah/efisien

c) **Sosialisasi Pajak**

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Atika dan Rika dalam Suyanto dan Yahya, 2016).

Sosialisasi pajak yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan suatu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak di daerah terkait dengan pemberian informasi terhadap wajib pajak UMKM atas penerapan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Indikator untuk mengukur variabel sosialisasi pajak ini diambil dari penelitian Suyanto dan Yahya (2016) berupa 5 item pernyataan sebagai berikut :

1. Kantor pajak memberikan penyuluhan informasi penerapan dan pemberitahuan tarif pajak yang baru
2. Fiskus/petugas pajak memberikan penjelasan secara langsung
3. Pengenalan/pemasangan iklan di media
4. Menyebarkan informasi melalui surat edaran kepada masyarakat
5. Penyebaran buku/*booklet*/*leaflet* perpajakan kepada masyarakat

d) **Perubahan Tarif Pajak**

Perubahan Tarif pajak adalah kenaikan atau penurunan tarif pajak atas objek pajak penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase (%) yang di tetapkan oleh pemerintah dalam suatu kebijakan penetapan tarif pajak. Yang dimaksud perubahan tarif pajak dalam penelitian ini adalah penurunan tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan 6 item pernyataan yang diambil dari penelitian Kusumawati (2019) sebagai indikator untuk mengukur variabel independen perubahan tarif pajak dengan indikator sebagai berikut:

1. Tarif pajak tidak memberatkan
2. Tarif pajak sudah disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak
3. Tarif pajak 0,5% bersifat final dalam PP No 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan dalam menjalankan peraturan perpajakan
4. Tarif pajak menguntungkan Wajib Pajak
5. Tarif pajak PP 23 Tahun 2018 sebagai upaya untuk menyederhanakan aturan perpajakan
6. Wajib Pajak secara sukarela memilih tarif pajak yang baru untuk menghitung besarnya kewajiban pajak

e) **Tingkat Kepatuhan Pajak**

Tingkat kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak digunakan 6 item pernyataan yang diambil dari penelitian Fadhilah (2018) sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengisi SPT sesuai dengan peraturan
3. Kepatuhan Wajib Pajak untuk mengisi dan menyampaikan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
4. Kepatuhan dalam penghitungan pajak terutang atas penghasilan yang diterima dan diperoleh
5. Kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diterima dan diperoleh.
6. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

f) **Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak**

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal yang berkaitan perpajakan yang diketahui dan di mengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak (Aulinisa, 2016).

Untuk mengukur variabel pemahaman dan pengetahuan perpajakan digunakan indikator 8 pernyataan yang diambil dari penelitian Aulinisa (2016) sebagai berikut:

1. Saya memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan (PP Nomor 23 Tahun 2018) yang harus di bayar dan angsuran pajak setiap bulannya
2. Saya memahami tata cara pembayaran pajak
3. Saya memahami batas waktu pembayaran pajak untuk setiap bulannya
4. Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak
5. Saya memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
6. Saya memahami tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
7. Saya memahami batas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
8. Saya memahami sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak

Pengukuran data dari setiap variabel di atas diperoleh dari jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Pengukuran data dilakukan dengan skala likert 1-4 yaitu pilihan responden atau jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 4, Setuju (S) diberi skor 3, Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel yang diteliti, yang meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian.

3.4.2. Uji Kualitas Data

3.4.2.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner **t**ersebut.

Uji validitas dilakukan dengan cara menghitung korelasi antarskor masing-masing butir pernyataan dengan skor total menggunakan teknik korelasi *Pearson Corellation*. Untuk mengetahui apakah variabel yang diuji valid atau tidak, hasil korelasi dibandingkan dengan taraf signifikan 5% (Ghozali, 2011). Jika angka korelasi hasil perhitungan lebih besar dibandingkan angka signifikansi, maka butir angka pernyataan tersebut dinyatakan valid dan signifikan

3.4.2.2. Uji Reliabilitas

Dalam analisis statistik pada penelitian, uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket yang digunakan oleh peneliti sehingga angket tersebut dapat

digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Walaupun penelitian ini dilakukan berulang-ulang dengan angket atau kuesioner yang sama, tetapi masih perlu dilakukan uji reliabilitas.

Untuk mengukur reliabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruksi atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

3.4.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu bagian dari uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi data memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Sebelum dilakukan uji hipotesis maka data yang dimiliki perlu di uji kenormalan distribusinya, parameter data yang dimiliki baik adalah data yang terdistribusi normal. Dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi (Sig.) > 0.05 maka dapat dikatakan data penelitian yang dimiliki terdistribusi

normal. Sebaliknya apabila signifikansi (Sig.) < 0.05 maka data penelitian yang dimiliki tidak terdistribusi normal

3.4.3.2. Uji Multikolinearitas

Merupakan bagian dari uji asumsi klasik untuk menguji apakah dalam penelitian terdapat korelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independen dengan cara menganalisis matriks korelasi antara variabel independen dan perhitungan nilai *tolenace* dan *Value Inlation Factor (VIF).* Nilai *cut-off* yang sering digunakan untuk menunjukkann adanya multikoloneraritas adalah nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonearitas pada persamaan regresi penelitian (Ghozali, 2011).

3.4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* (variasi) dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari nilai residual pengamatan satu ke pengamatan lain tidak sama, maka dikatakan heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Dasar pengambilan keputusan dari uji ini adalah apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0.05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai (Sig.)

< 0.05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian yang baik seharusnya tidak ada gejala heteroskedastisitas.

3.4.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji atau mengetahui besar kecilnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Selain itu, analisis regresi linier berganda ini juga dapat menunjukkann arah hubungan variabel-variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan program SPSS versi 22.

Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e}$$

Keterangan:

b_{1-5} : Koefisien Regresi

a : Konstanta

e : Error

Y : Penerimaan Pajak UMKM

X_1 : Kualitas Pelayanan Fiskus

X_2 : Sosialisasi Pajak

X_3 :Perubahan Tarif Pajak

X_4 : Tingkat Kepatuhan Pajak

X_5 :Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

3.4.5. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1. Nilai R Square yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.4.6. Uji t (Parsial)

Uji t adalah salah satu uji hipotesis dalam analisis regresi linier yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi (Sig.) ≤ derajat probabilitas 0.05 dapat simpulkan terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), atau dengan kata lain H_0 tolak dan Ha diterima. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi (Sig.) > derajat probabilitas 0.05, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). (Ghozali, 2011)

3.4.7. Pembahasan

Di bagian ini akan dilakukan pembahasan dengan cara membandingkan hasil penelitian ini dengan teori dan konsep yang relevan serta dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Yogyakarta. Dari 100 responden yang diambil, terdapat 1 responden merupakan wajib pajak badan dan 99 responden merupakan wajib pajak orang pribadi. Karakteristik responden dalam penelitian ini terdiri dari sektor usaha, lama usaha, jumlah karyawan, omset usaha, dan peredaran bruto yang diperoleh dalam setahun. Karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta dibagi menjadi 10 sektor usaha yaitu sektor agrobisnis, usaha bahan bangunan, usaha bidang *fashion*, usaha kuliner, usaha toko kelontong, usaha jasa *laundry*, kerajinan, industri lainnya, perdagangan lainnya, dan sektor jasa lainnya. Dari 100 responden penelitian ini didapatkan paling banyak sektor usaha berasal dari sektor usaha kuliner.

Adapun rincian sektor usaha responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1

Data Sektor usaha

No.	Sektor Usaha	Jumlah
1.	Agrobisnis	3
2.	Usaha Bahan Bangunan	2
3.	Usaha Bidang *Fashion*	11
4.	Usaha Kuliner	35
5.	Usaha Toko Kelontong	8
6.	Usaha Jasa *Laundry*	6
7.	Kerajinan	1
8.	Industri Lainnya	2
9.	Perdagangan Lainnya	25
10.	Jasa Lainnya	7

Sumber: Data Primer, diolah

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Dari 100 responden dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa sebanyak 58 responden telah memiliki usaha dengan usia kurang dari 5 tahun, 23responden memiliki usaha dengan rentang usia 5 sampai dengan 10 tahun, 5 responden memiliki usaha dengan rentang usia >10 sampai dengan 15 tahun, dan usaha yang memiliki usia lebih dari 15 tahun terdapat 14 responden.

Rincian karakteristik lama usaha responden tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. 2

Data Lama Usaha

No.	Lama Usaha	Jumlah
1.	< 5 tahun	58
2.	5-10 tahun	23
3.	>10-15 tahun	5
4.	>15 tahun	14

Sumber: Data Primer, diolah

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan

Adapun karakteristik responden berdasarkan jumlah karyawannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 3

Data Jumlah Karyawan

No.	Jumlah Karyawan	Jumlah Responden
1.	< 4 orang	74
2.	5-20 orang	23
3.	>20-100 orang	3
4.	>100 orang	-

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini, dalam usahanya, memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari seratusorang dengan rincian sebanyak 74 responden mempunyai karyawan kurang dari 4 orang, 23 responden memiliki karyawan dengan rentang 5-20 orang, dan3 responden memiliki karyawan dengan rentang >20-100 orang.

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Omset Usaha

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa hasil penelitian dari 100 responden, 80 responden memiliki omset usaha dalam setahun sebesar Rp 0 – 300 juta, 17 responden memiliki omset usaha Rp 300 juta–2,5 miliar, dan 3 responden memiliki omset usaha Rp2,5 miliar – 50 miliar.

Tabel 4. 4

Data Omset Usaha

No.	Omset Usaha	Jumlah
1.	Rp 0 – Rp 300 juta	80
2.	Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar	17
3.	Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar	3

Sumber: Data Primer, diolah

4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Peredaran Bruto Setahun

Tabel 4. 5

Data Peredaran Bruto

No.	Peredaran Bruto	Jumlah
1.	≤ Rp 4.800.000.000	100
2.	> Rp 4.800.000.000	-

Sumber: Data Primer, diolah

Dari 100 responden dalam penelitian ini seluruhnya memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar seperti yang di tunjukkan pada tabel di atas

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik variabel yang diteliti. Statistik deskriptif ini meliputi jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Tabel berikut menunjukkann data hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini.

Tabel 4. 6

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	**N**	**Minimum**	**Maksimum**	***Mean***	**Standar Deviasi**
Penerimaan Pajak UMKM	100	1	4	3,095	0,705
Kualitas Pelayanan Fiskus	100	1	4	2,835	0,720
Sosialisasi Pajak	100	1	4	2,892	0,741
Perubahan Tarif Pajak	100	1	4	2,845	0,787
Tingkat Kepatuhan Pajak	100	1	4	2,858	0,731
Pengetahuan dan Pemahaman Pajak	100	1	4	2,816	0,745

Sumber: Data Primer, diolah

Penelitian ini menggunakan variabel dependen Penerimaan Pajak UMKM dan variabel independen Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Kepatuhan Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Pajak. Berdasarkan tabel diatas, hasil penelitian ini menunjukkann bahwa:

1. Variabel penerimaan pajak UMKM memiliki nilai minimum 1. Nilai minimum 1 berarti responden paling rendah memberikan jawaban atas penerimaan pajak UMKM adalah 1. Nilai maksimum 4, berarti responden memberikan jawaban atas penerimaan pajak UMKM paling tinggi adalah 4. Nilai rata- rata sebesar 3.095, berarti rata-rata secara keseluruhan responden dalam penelitian ini memberikan jawaban terhadap penerimaan pajak UMKMadalah 3.095 dan nilai standar deviasi sebesar 0,705. Nilai

rata-rata lebih besar dari standar deviasi, maka data sampel bersifat homogen

2. Variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki nilai minimum 1, artinya responden paling rendah memberikan jawaban atas pernyataan kualitas pelayanan fiskus adalah 1. Nilai maksimum 4, berarti responden memberikan jawaban paling tinggi adalah 4.Selanjutnya Nilai rata-rata sebesar 2,835, berarti rata-rata secara keseluruhan responden memberikan jawaban atas pernyataan kualitas pelayanan fiskus sebesar 2,835 dan nilai standar deviasi sebesar 0,720. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi, artinya data sampel bersifat homogen
3. Variabel sosialisasi pajak memiliki nilai minimum 1 berarti responden paling rendah memberikan jawaban terhadap pernyataan sosialisasi pajak adalah 1. Nilai maksimum 4, berarti responden paling tinggi memberikan jawaban terhadap sosialisasi pajak adalah 4. Selanjutnya untuk nilai rata-rata sebesar 2,892, berarti rata-rata secara keseluruhan responden memberikan jawaban atas pernyataan sosialisasi pajak adalah 2,892. Nilai standar deviasi sebesar 0,741 lebih kecil dari rata-rata, maka data sampel bersifat homogen.
4. Variabel perubahan tarif pajak memiliki nilai minimum 1 artinya responden paling rendah memberikan jawaban atas pernyataan perubahan tarif pajak adalah 1. Nilai maksimum 4 menunjukkann bahwa paling tinggi responden memberikan jawaban atas pernyataan perubahan tarif adal 4. Selanjutnya nilai rata-rata sebesar 2,845, artinya rata-rata secara

keseluruhan responden memberikan jawaban. Nilai standar deviasi sebesar 0,787 lebih kecil dari nilai rata-rata, berarti data sampel bersifat homogen.

5. Variabel tingkat kepatuhan pajak memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 4, nilai rata-rata sebesar 2,858, dan nilai standar deviasi sebesar 0,731. Nilai minimum 1 artinya paling rendah responden memberikan jawaban paling rendah 1, dan nilai maksimum 4 berarti responden paling tinggi memberikan jawaban atas pernyataan tingkat kepatuhan pajak adalah 4. Nilai rata-rata 2,858 artinya rata-rata secara keseluruhan responden memberikan jawaban atas pernyataan tingkat kepatuhan sebesar 2,858. Nilai standar deviasi 0,731 kurang dari nilai rata-rata, berarti data sampel bersifat homogen.
6. Variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak memiliki nilai minimum 1, nilai maksimum 4, nilai rata-rata sebesar 2,816, dan nilai standar deviasi sebesar 0,745. Nilai minimum 1 artinya responden paling rendah memberikan jawaban terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah 1 dan nilai maksimum 4 berarti responden memberikan jawaban paling tinggi adalah 4. Sedangkan nilai rata-rata 2,816 berarti rata-rata secara keseluruhan responden memberikan jawaban terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah 2,816 dan nilai standar deviasi 0,745 lebih kecil dari nilai rata-rata berarti data sampel yang digunakan bersifat homogen.

4.3 Analisis Uji Kualitas Data

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Untuk mengetahui valid tidaknya variabel yang diuji, hasil penelitian dibandingkan dengan taraf signifikan 5% dan nilai df dari jumlah sampel 100 adalah 0,1654. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. 7

Hasil Uji Validitas

No.	Variabel	Item	r Hitung	Sig	r Tabel	Keterangan
1.	Penerimaan Pajak UMKM	PN1	0,699	0,000	0,1654	Valid
		PN2	0,627	0,000	0,1654	Valid
		PN3	0,768	0,000	0,1654	Valid
		PN4	0,785	0,000	0,1654	Valid
		PN5	0,813	0,000	0,1654	Valid
		PN6	0,626	0,000	0,1654	Valid
2.	Kualitas Pelayan Fiskus	PF1	0,816	0,000	0,1654	Valid
		PF2	0,681	0,000	0,1654	Valid
		PF3	0,785	0,000	0,1654	Valid
		PF4	0,577	0,000	0,1654	Valid
		PF5	0,663	0,000	0,1654	Valid
		PF6	0,742	0,000	0,1654	Valid
3.	Sosialisasi Pajak	SP1	0,733	0,000	0,1654	Valid
		SP2	0,773	0,000	0,1654	Valid
		SP3	0,786	0,000	0,1654	Valid
		SP4	0,621	0,000	0,1654	Valid
		SP5	0,634	0,000	0,1654	Valid
4.	Perubahan Tarif Pajak	PT1	0,769	0,000	0,1654	Valid
		PT2	0,930	0,000	0,1654	Valid
		PT3	0,885	0,000	0,1654	Valid
		PT4	0,923	0,000	0,1654	Valid

No.	Variabel	Item	r Hitung	Sig	r Tabel	Keterangan
		PT5	0,913	0,000	0,1654	Valid
		PT6	0,517	0,000	0,1654	Valid
5.	Tingkat Kepatuhan Pajak	KP1	0,589	0,000	0,1654	Valid
		KP2	0,847	0,000	0,1654	Valid
		KP3	0,842	0,000	0,1654	Valid
		KP4	0,824	0,000	0,1654	Valid
		KP5	0,802	0,000	0,1654	Valid
		KP6	0,820	0,000	0,1654	Valid
6.	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	PNG1	0,600	0,000	0,1654	Valid
		PNG2	0,606	0,000	0,1654	Valid
		PNG3	0,624	0,000	0,1654	Valid
		PNG4	0,763	0,000	0,1654	Valid
		PNG5	0,835	0,000	0,1654	Valid
		PNG6	0,863	0,000	0,1654	Valid
		PNG7	0,718	0,000	0,1654	Valid
		PNG8	0,802	0,000	0,1654	Valid

Sumber: Data Primer, diolah

Dari tabel di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa semua item pernyataan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa variabel penerimaan pajak UMKM, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, perubahan tarif pajak, tingkat kepatuhan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dapat dikatakan valid karena nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berfungsi untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu angket atau kuesioner yang digunakan sehingga angket atau kuesioner tersebut dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas variabel penelitian. Untuk mengukur reliabilitas, peneliti

menggunakan program SPSS versi 22 dengan uji statistik *Cronbach's Alpha*. Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha*> 0,60. Adapun hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8

Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's	Nilai Kritis	Keterangan
1.	Penerimaan Pajak UMKM	0,808	0,60	Reliabel
2.	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,800	0,60	Reliabel
3.	Sosialisasi Pajak	0,747	0,60	Reliabel
4.	Perubahan Tarif Pajak	0,908	0,60	Reliabel
5.	Tingkat Kepatuhan Pajak	0,867	0,60	Reliabel
6.	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	0,873	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah

4.4 Analisis Pengujian Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kelayakan model regresi dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang dilakukandi antaranya adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

4.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Sebelum dilakukan uji hipotesis,data yang dimiliki perlu diuji

kenormalan distribusinya. Parameter data yang dimiliki dikatakan baik apabila data yang terdistribusi normal. Dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikansi (Sig.) > 0.05, maka dapat dikatakan bahwa data penelitian yang dimiliki terdistribusi normal. Berikut adalah tabel yang menunjukkann hasil uji normalitas.

Tabel 4. 9

Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	**Keterangan**
0,200	Terdistribusi Normal

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terdistribusi normal. Hal itu dapat dilihat dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0,05 sebagai nilai dasar pengambilan keputusan.

4.4.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam penelitian terdapat korelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independen dengan cara menganalisis matriks korelasi antara variabel independen dengan perhitungan nilai *tolerance* dan *Value Inlation Factor (VIF).* Nilai *cut-off* yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya multikoloneraritas yaitu nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 sama dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Apabila nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonearitas pada persamaan regresi penelitian

(Ghozali, 2011). Hasil pengujian uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 10

Hasil Uji Multikolinearitas

No.	Variabel	Nilai Tolerance	Batas Nilai Tolerance	Nilai VIF	Batas Nilai VIF
1.	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,480	0,1	2,084	10
2.	Sosialisasi Pajak	0,471	0,1	2,125	10
3.	Perubahan Tarif Pajak	0,382	0,1	2,308	10
4.	Tingkat Kepatuhan Pajak	0,433	0,1	2,621	10
5.	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	0,311	0,1	2,211	10

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan tabel di atas seluruh variabel yang berupa kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, perubahan tarif, tingkat kepatuhan, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak memiliki nilai toleransi lebih besar daripada batas nilai toleransi 0,1 dan nilai VIF lebih kecil daripada batas nilai VIF 10. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

4.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* (variasi) dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Dasar

pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikansi (Sig.) > 0.05, maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai (Sig.) < 0.05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian yang baik, seharusnya tidak ada gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil dari pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4. 11

Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Signifikansi	Alpha	Keterangan
1.	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,731	0,05	Homoskedastisitas
2.	Sosialisasi Pajak	0,904	0,05	Homoskedastisitas
3.	Perubahan Tarif Pajak	0,787	0,05	Homoskedastisitas
4.	Tingkat Kepatuhan Pajak	0,846	0,05	Homoskedastisitas
5.	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak	0,818	0,05	Homoskedastisitas

Sumber: data primer, diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel kualitas pelayanan pajak, sosialisasi pajak, perubahan tarif pajak, tingkat kepatuhan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak memiliki nilai lebih dari 0,05 sehingga seluruh variabel independen tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan kata lain, seluruh variabel dapat dikatakan homoskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji atau mengetahui besar kecilnya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Selain itu, analisis regresi linier berganda ini juga dapat menunjukkann arah hubungan variabel-variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2011). Berikut disajikan hasil uji regresi linear berganda.

Tabel 4. 12

Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
(Constant)	4,900	1,235		3,967	0,000
X1	0,150	0,090	0,152	1,674	0,097
X2	0,257	0,106	0,221	2,416	0,018
X3	-0,254	0,074	-0,263	-2,756	0,007
X4	0,357	0,090	0,401	3,949	0,000
X5	0,211	0,079	0,302	2,688	0,009

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh model regresi sebagai berikut:

Y = 4,900 + 0,150X1 + 0,257X2 – 0,254X3 + 0,357X4 + 0,211X5

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta nilai 4,900 bahwa menunjukkann jika variabel-variabel independen yang berupa kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, perubahan tarif pajak, tingkat kepatuhan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak diasumsikan tidak mengalami perubahan

(konstan), maka nilai Y (penerimaan pajak UMKM) adalah sebesar 4,900 satuan.

2. Koefisien variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,150 menunjukkann bahwa setiap kenaikan variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 1 satuan, penerimaan pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,150 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. Koefisien variabel sosialisasi pajak sebesar 0,257 menunjukkann bahwa setiap kenaikan variabel sosialisasi pajak sebesar 1 satuan, penerimaan pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,257 satuan dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Koefisien variabel yang berupa perubahan tarif pajaksebesar –0,254. menunjukkann bahwa setiap kenaikan variabel perubahan tarif pajak sebesar 1 satuan, penerimaan pajak UMKM akan menurun sebesar 0,254 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap atau tidak mengalami perubahan.
5. Koefisien variabel tingkat kepatuhan pajak sebesar 0,357 berarti menunjukkann bahwa setiap kenaikan variabel tingkat kepatuhan sebesar 1 satuan, penerimaan pajak UMKM akan meningkat sebesar 0,357 satuan dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan atau konstan.
6. Koefisien variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sebesar 0,211 berarti menunjukkann bahwa setiap kenaikan variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, penerimaan pajak UMKM akan meningkat

sebesar 0,211 satuan dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan atau tetap.

4.6 Analisis Pengujian Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hal itu seperti terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 13

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R Square
0,610

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan tabel 4.13 hasil dari penelitian ini diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,610. Hal ini berarti kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, perubahan tarif pajak, tingkat kepatuhan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mampu menjelaskan variasi penerimaan pajak UMKM sebesar 61%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model regresi ini.

4.7 Uji t (Parsial)

Uji t adalah salah satu uji hipotesis dalam analisis regresi linier yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh

secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Dengan dasar pengambilan keputusan apabila nilai signifikansi (Sig.) ≤ derajat probabilitas 0.05 dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Hasil uji t dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 14

Hasil Uji t Statistik

Model	**Unstandardized Coefficients**		**Standardized Coefficient**	**t**	**Sig.**
	B	**Std. Error**	**Beta**		
(constant)	4,900	1,235		3,967	0,000
X1	0,150	0,090	0,152	1,674	0,097
X2	0,257	0,106	0,221	2,416	0,018
X3	-0,204	0.074	-0,263	-2,756	0.007
X4	0,357	0,090	0,401	3,949	0,000
X5	0,211	0,079	0,302	2,688	0,009

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak UMKM

   Uji t ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap penerimaan pajak UMKM. Hipotesis pertama menyatakan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif

terhadap penerimaan pajak UMKM. Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh nilai signifikansi variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 0,097 dengan koefisien regresi sebesar 0,150. Nilai signifikansi 0,097 > 0,05 menunjukkann bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak UMKM sehingga hipotesis pertama ditolak.

2. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak UMKM

   Uji t ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap penerimaan pajak UMKM. hipotesis kedua menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM. Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh nilai signifikansi variabel sosialisasi pajak 0,018 dengan koefisien regresi sebesar 0,257. Nilai signifikasi 0,018 ≤ 0,05 menunjukkann bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM sehingga hipotesis kedua diterima

3. Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap penerimaan pajak UMKM

   Uji t ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif terhadap penerimaan pajak UMKM. Hipotesis ketiga menyatakan perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM. Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh nilai signifikansi variabel perubahan tarif sebesar 0,007 dengan koefisien regresi -0,254. Nilai signifikasi 0,007 ≤ 0,05 menunjukkann bahwa perubahan tarif pajak

berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak UMKM sehingga hipotesis ketiga ditolak

4. Pengaruh tingkat kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak UMKM

   Uji t ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak UMKM. Hipotesis keempat menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM. Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh nilai signifikansi variabel tingkat kepatuhan pajak 0,000 dengan koefisien regresi 0,357. Nilai signifikansi 0,000 ≤ 0,05 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM sehingga hipotesis keempat diterima

5. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak UMKM

   Uji t ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak UMKM. Hipotesis kelima menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM. Berdasarkan tabel 4.14 diperoleh nilai signifikansi variabel pengetahuan dan pemhaman wajib pajak sebesar 0,009 dengan koefisien regresi 0,211. Nilai signifikansi 0,009 ≤ 0,05 menunjukkann bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM sehingga hipotesis kelima diterima

4.8 Pembahasan

Berdasarkan hasil uji t maka dapat dibuat ringkasan tabel hasil uji hipotesis seperti berikut:

Tabel 4. 15

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis		B	t	Sig.	Keterangan
H1	Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM	0,150	1,674	0,097	Hipotesis Tidak Didukung
H2	Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM	0,257	2,416	0,018	Hipotesis Didukung
H3	Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM	-0,254	-2,756	0,007	Hipotesis Tidak Didukung
H4	Tingkat kepatuhan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM	0,357	3,949	0,000	Hipotesis Didukung
H5	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM	0,211	2,688	0,009	Hipotesis Didukung

Sumber: Data Primer, diolah

a) Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Penerimaan Pajak UMKM

Berdasarkan tabel ringkasan 4.15 hasil uji t statistik dapat diketahui bahwa pada variabel kualitas pelayanan fiskus mempunyai nilai signifikansi 0,097 angka ini lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini berarti kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM. Dengan demikian hipotesis pertama yang berbunyi kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM **tidak didukung**. Hasil penelitian ini

didukung oleh penelitian Widiawati dan Mita (2016) yang menyatakan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Hal ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan perilaku seseorang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bisa terjadi karena wajib pajak UMKM menganggap pelayanan fiskus belum memadai. Dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan, wajib pajak UMKM berpendapat bahwa pelayanan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak belum sesuai dengan harapan, karena petugas atau fiskus kurang memberikan arahan dan informasi, petugas yang kurang ramah.

Namun, walaupun seperti itu wajib pajak tetap saja melakukan pembayaran pajaknya dikarenakan kemungkinan wajib pajak memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa membayar pajak memanglah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak membayar akan ada konsekuensi diberikan sanksi. Sehingga apabila pelayanan yang diberikan oleh fiskus dianggap kurang memadai, maka tidak memengaruhi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Selain itu, saat ini pembayaran pajak juga dapat dilakukan dengan berbagai cara yang salah satunya wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Hal ini membuat interaksi antara wajib pajak dan fiskus berkurang sehingga wajib pajak tidak bisa memberikan persepsi positif atau negatif terhadap kualitas pelayanan fiskus.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Putriani dan Budiartha (2016); Cahyono (2017); Fadhillah (2018). Penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini di karenakan terdapat perbedaan objek penelitian dan tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan Putriani dan Budiartha (2016) menggunakan objek penelitian hanya wajib pajak badan di KPP Denpasar Timur, Cahyono (2017) menggunakan objek penelitian wajib pajak orang pribadi di KPP Surakarta, Fadhillah (2018) menggunakan objek penelitian wajib pajak orang pribadi di KPP Medan Timur. Perbedaan objek penelitian tersebut memungkinkan adanya perbedaan jawaban pada tiap responden. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan objek penelitian yang spesifik yaitu wajib pajak orang pribadi maupun badan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

b) Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji t dapat diketahui bahwa variabel sosialisasi pajak mempunyai nilai signifikansi 0,018, nilai ini kurang dari nilai signifikasi 0,05 dengan koefisien regresi sebesar 0,257 bernilai positif. Artinya sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM. Sehingga H2 yang berbunyi sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM dapat diterima atau dapat dikatakan **hipotesis kedua didukung.**

Hasil penelitian ini menunjukkann sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak UMKM disebabkan UMKM di kota Yogyakarta menganggap sosialisasi pajak sangat penting untuk menumbuhkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak UMKM untuk membayar pajak. Hal ini di dukung oleh teori pembelajaran sosial yang dikemukan oleh Bandura (1971). Teori pembelajaran sosial adalah teori yang dilakukan melalui peniruan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat merupakan sarana pembelajaran dan pembinaan. Wajib pajak UMKM akan mendapatkan tahap-tahap proses pembelajaran dan peniruan terhadap rekan sesamanya, maupun petugas pajak.

Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Suyanto dan Yahya (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM. Hal ini dikarenakan sosialisasi pajak memegang peranan penting sebagai faktor yang memengaruhi penerimaan pajak. Sosialisasi pajak dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai macam cara melalui media cetak maupun elektronik atau penyuluhan secara langsung terhadap wajib pajak. kegiatan sosialisasi merupakan suatu upaya atau proses untuk memberikan informasi. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta sendiri telah berupaya meningkatkan sosialisasi pajak kepada UMKM dengan cara memberikan fasilitas kelas-kelas pajak kepada UMKM

dampingannya. Dengan demikian semakin tinggi sosialisasi pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak UMKM.

c) Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Penerimaan Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji t pada variabel perubahan tarif pajak mempunyai nilai signifikansi 0,018 dengan koefisien regresi bernilai negatif. Hal ini berarti perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak UMKM. Dengan demikian hipotesis ketiga yang berbunyi perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM **tidak didukung.**

Hal ini tidak sejalan dengan teori ekonomi yang berlaku hukum apabila suatu harga mengalami penurunan, maka penerimaan atau pendapatan juga akan mengalami penurunan. Dalam hubungannya dengan perpajakan berarti apabila tarif pajak menurun, maka penerimaan pajaknya akan ikut mengalami penurunan. Perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan pajak UMKM bisa terjadi disebabkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak yang mau membayar pajak terutangnya. Dari hasil wawancara di lapangan ditemukan beberapa responden merupakan wajib pajak yang baru mendaftar pada saat setelah terbitnya peraturan baru yang mengatur pajak UMKM. Artinya kemungkinan wajib pajak tertarik atau termotivasi untuk membayar kewajiban pajaknya dikarenakan menganggap tarif yang diberlakukan relatif kecil. Sehingga tarif yang relatif kecil tersebut dapat menyebabkan

ekstensifikasi wajib pajak yang juga akan mempengaruhi penerimaan pajak UMKM.

Hasil ini di dukung oleh penelitian Salwa (2019) yang menyatakan terdapat pengaruh negatif perubahan tarif pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Kebijakan penentuan tarif pajak merupakan suatu hal yang sangat memengaruhi penerimaan pajak, tingginya tarif pajak akan membuat keengganan wajib pajak untuk membayar pajak dan juga akan menimbulkan suatu risiko kecurangan (Damayanti, Suhadak, dan Pamungkas, 2016). Tarif yang rendah harapannya akan meningkatkan sikap kesukarelaan wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Dengan demikian semakin kecil tarif pajak yang diberlakukan akan meningkatkan penerimaan pajak UMKM.

d) Pengaruh Tingkat Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji t dapat diketahui bahwa pada variabel tingkat kepatuhan memiliki nilai signifikansi 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai signifikasi 0,05 dengan koefisien regresi positif. Hal ini berarti terdapat pengaruh positif tingkat kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak UMKM. Sehingga H4 yang berbunyi tingkat kepatuhan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM diterima atau dapat dikatakan **hipotesis keempat didukung.**

Hasil ini sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour* relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.Dalam teori ini terdapat faktor *behavioural*

beliefs yang merupakan suatu keyakinan individu mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Hal ini disebabkan wajib pajak telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan dan kesadaran akan pentingnya taat membayar pajak untuk kontribusi terhadap penerimaan negara di sektor pajak sehingga sikap atau tindakan patuh dapat dilakukan oleh wajib pajak

Hasil ini didukung oleh penelitian Sulistyawati, Lestari, dan Triandari (2012); Mahendra dan Sukartha (2014); Puspareni, Purnamawati, dan Wahyuni (2017) yang menyatakan kepatuhan pajak memengaruhi penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nainggolan dan Pinem, 2019). Kepatuhan pajak tersebut meliputi kepatuhan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak terutangnya. Tinggi rendahnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan membayar pajak. Menurut Hasan dalam Puspareni, Purnamawati, dan Wahyuni (2017), kepatuhan perpajakan dibutuhkan suatu sikap kerelaan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak akan semakin tinggi pula penerimaan pajak UMKM

e) Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak UMKM

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji t dapat diketahui bahwa pada variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mempunyai nilai signifikansi 0,009,nilai ini lebih kecil dari nilai0,05 dengan koefisien regresi positif. Artinya terdapat pengaruh positif variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap variabel penerimaan pajak UMKM. Sehingga H5 yang berbunyi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM diterima atau dnegankata lain, **hipotesis kelima didukung.**

Dalam teori atribusi, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak termasuk faktor internal atau yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang memengaruhi persepsi dalam pengambilan keputusan mengenai perilaku dalam melaksanakan atau membayar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak mau membayar karena mengetahui dan memahami fungsi, manfaat dan pentingnya kewajiban membayar pajak serta ketentuan-ketentuan dalam perpajakan.

Hasil ini didukung oleh penelitian Manengkey, Pangemanan dan Pontoh (2015); Astuti dan Panjaitan (2017) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk menyetorkan kewajiban pajaknya. Ketentuan yang diatur dalam PP No 23/2018 perlu diketahui dan dipahami, dengan begitu wajib pajak UMKM dapat terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak ini tidak terlepas

dari peran pemerintah untuk melakukan sosialisasi informasi-informasi perpajakan.Sehingga semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak UMKM

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi pajak, perubahan tarif pajak, tingkat kepatuhan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak UMKM. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak UMKM. Hasil ini berdasarkan uji statistik yang menunjukkann nilai signifikansi 0,097 > 0,05 dengan koefisien regresi positif 0,150. Hal ini berarti tinggi rendahnya kualitas pelayanan fiskus tidak memengaruhi penerimaan pajak UMKM
2. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM. Hasil ini berdasarkan uji statistik yang menunjukkan nilai signifikansi 0,018 ≤ 0,05 dengan koefisien regresi positif 0,257. Hal ini berarti semakin tinggi sosialisasi pajak akan meningkatkan penerimaan pajak UMKM
3. Perubahan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak UMKM. Hasil ini berdasarkan uji statistik yang menunjukkann nilai signifikansi 0,007 ≤ 0,05 dengan koefisien regresi negatif 0,254. Hal ini berarti jika terjadi penurunan tarif pajak akan meningkatkan penerimaan pajak UMKM

4. Tingkat kepatuhan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM. Hasil ini berdasarkan uji statistik yang menunjukkann nilai signifikansi 0,000 ≤ 0,05 dengan koefisien regresi positif 0,357. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak UMKM.
5. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak UMKM. Hasil ini berdasarkan uji statistik yang menunjukkann nilai signifikasi 0,009 ≤ 0,05 dengan koefisien regresi positif 0,211. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan meningkatkan penerimaan pajak UMKM

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang dihadapi peneliti yaitu:

1. Koefisien determinan menunjukkann 61% artinya dari kelima variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih belum maksimal menentukan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak.
2. Penggunaan data dari hasil kuesioner. Penelitian dengan metode pengumpulan data seperti ini terdapat beberapa kelemahan yaitu kemungkinan bahwa responden yang mengisi kuesioner penelitian ini tidak mengisi dengan bersungguh-sungguh sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya

5.3 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikemukakan implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas Pajak Setempat

   Bagi otoritas pajak setempat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, khususnya pajak UMKM. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat melakukan sosialisasi intensif sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Selain itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga dapat berkoordinasi dengan dinas yang mempunyai kewenangan mengelola UMKM sehingga UMKM di Kota Yogyakarta dapat tumbuh dan berkembang.

2. Bagi Wajib Pajak

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi wajib pajak pelaku usaha UMKM mengenai pajak yang dikenakan atas penghasilan UMKM, sehingga secara tidak langsung wajib pajak dapat mengambil peran untuk membantu pemerintah dalam pembangunan negara.

5.4 Saran

Berdasarkan uraian simpulan di atas, peneliti menyampaikan saran kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak UMKM. Adapun saran tersebut adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan kembali untuk penelitian dengan menambahkan beberapa variabel lain yang berada diluar penelitian ini.
2. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat menambahkan data-data pendukung baik berupa data primer maupun data sekunder untuk memperkuat dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya
3. Kebijakan penurunan tarif pajak UMKM merupakan suatu keputusan yang dianggap baik bagi pelaku UMKM sehingga diharapkan pemerintah melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM agar dapat menjaring jumlah yang lebih banyak lagi UMKM yang membayar pajak sehingga penerimaan pajak UMKM dapat mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, R. (2013). "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan". *Jurnal Akuntansi UNESA, 1*(3).

Ajzen. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Academic Press. Inc,* 27 September. https://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_4931_0.pdf

Amanah, D. F., dan Rustam, A. R. (2016). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kepemilikan NPWP, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi Pengusaha (Studi KPP Pratama Malang Selatan)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 3*(2).

Anonim. "Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assesment." Klikpajak.id. https://klikpajak.id/blog/tips-pajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/

Anonim. "Gebyar UMKM: DJP Dorong UMKM Menuju Sistem Digital" pajak.go.id. https://www.pajak.go.id/id/berita/gebyar-umkm-djp-dorong-umkm-menuju-sistem-digital

Anonim. "Sri Mulyani Beberkan Upaya Genjot Penerimaan Pajak dan PNBP" liputan6.com tanggal publikasi 18 juli 2019 https://www.liputan6.com/bisnis/read/4013875/sri-mulyani-beberkan-upaya-genjot-penerimaan-pajak-dan-pnbp

Ananda, Pasca Rizki Dwi., Srikandi Kumadji., Achmad Husaini. (2015). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman

Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pratama Batu).” Jurnal Perpajakan, 6 (2).

Ariani, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Dampaknya terhadap Penerimaan. Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah

Astuti, A. N. P., & Panjaitan, I. (2017). “Pengaruh E-Faktur dan Pengetahuan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sunter, Jakarta Utara”. *Media Akuntansi Perpajakan, 2*(1), 1-13.

Aulinisa, Hanifah. (2016). “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Pribadi Pelaku UMKM (Studi Kasus pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Tegal Tahun 2015). Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia.

Cahyono, Y. T. (2017). “Analisis Faktor-Faktor yang memengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Empirik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)”. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, *2*(2), 163-175.

Cornelia Angelia, D., & Fajriana, I. “Pengaruh Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada Pelaku UMKM di Kota Palembang”.

Damayanti, O., Suhadak., & Pamungkas, M, G. (2016). Pengaruh Tingkat Inflasi, Economic Growth, dan Tarif Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Negara-negara Asia (Studi pada World Bank Periode 2005-2014). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, *9*(1).

Fadhilah, F. (2018). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”. Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Ghozali, Imam 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Edisi Kelima.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gustomo, Ma'aruf. "Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM". Kemenkeu.go.id.

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/tanggal publikasi 20 Maret 2018

Hair, J. F. (2010). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Upper Saddle River : NewJersey

Hidayat, Kurnia Saputra. "Pajak UMKM dan Tarif PPh Final Khusus UMKM yang Perlu Anda Ketahui". Jurnal.id.

https://www.jurnal.id/id/blog/pajak-umkm-dan-tarif-pph-final-khusus-umkm/tanggal publikasi 20 Januari 2019

Jatmiko, A. N. (2006). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)".Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).

Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak 2000, http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~KMK.04~2000Kep.htm

Kusumawati, Annisa Fitriana (2019). "AnalisisTingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dalam Rangka Peningkatan Penerimaan PPH Final (Studi Empiris pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II)". Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Laila, Q. N. (2015). Pemikiran Pendidikan Moral Albert Bandura. MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, 2(1), 21-36

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2017 https://www.pajak.go.id/sites/default/files/201903/LAKIN20DJP202017.pdf

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018 https://www.pajak.go.id/sites/default/files/201905/LAKIN20DJP202018.pdf

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019 https://www.pajak.go.id/sites/default/files/202002/LAKIN%20DJP%202019.pdf

Mahendra, P. P., dan Sukartha, I. M. (2014). "Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *E-Jurnal Akuntansi*, 633-643.

Manengkey, S. R., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2015). "Dampak Pemahaman Wajib Pajak atas PP Nomor 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Kotamobagu". *ACCOUNTABILITY*, *4*(1), 163-171.

Manna, P., Rosnawintang, R., & Nusantara, A. W. (2018). "Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, Tarif Pajak, dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Kendari". *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, *3*(1).

Nainggolan, B. R. M., dan Pinem, S. J. P. (2019). "Analisis Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan". *Journal of Economic, Bussines and Accounting*, *2*(2), 256-262.

Nangka, Y. M., Sabijono, H., & Tangkuman, S. (2014). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (PPh) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado". *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, *9*(1).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu https://www.pajak.go.id/sites/default/files/201905/PP%20Nomor%2023%20Tahun%202018.pdf

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Primandani, I., Syafi'i., Haryono. (2017). Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 padA KPP Pratama Mulyorejo. *E-Journal Akuntansi" EQUITY"*, *3*(3).

Prabantari, F., & Ardiyanto, M. D. (2017). Implementasi Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). *Diponegoro Journal of Accounting*, *6*(4), 399-410.

Pramandari, N. M. H., Yasa, N. P., & Herawati, N. T. (2018). "Mengungkap Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah (UMKM) Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, *9*(1).

Puspareni, K. D., Purnamawati, I. G. A., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, *7*(1).

Putriani, I. A. N., dan Budiartha, I. K. (2016). "Pengaruh Penyuluhan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *E-Jurnal Akuntansi*, 79-90.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu https://www.pajak.go.id/id/peraturan-pemerintah-nomor-23-tahun-2018

Rahman, Opnita. "Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sunset Policy Jilid II terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Madya Pekanbaru". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, vol. 4, Nomor. 1, Feb. 2017, pp. 1658-1671

Redaksi DDTCNews. "Jumlah WP UMKM Naik, Penerimaan Masih Turun".

https://news.ddtc.co.id/jumlah-wp-umkm-naik-penerimaan-masih-turun-17477?page_y=2500.333251953125

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan, Teori & Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Rohmani, Edmalia. "Empat Paradigma Baru Pajak UMKM." Pajak.go.id.

https://www.pajak.go.id/artikel/empat-paradigma-baru-pajak-umkm

Salwa, Ani. (2019). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2). Skripsi S1, Universitas Negeri Jakarta

Setiawan, Doni. (2020). " Dinilai "Tahan Banting", Kontribusi UMKM ke Pajak Diharapkan Naik". Ddtc.co.id https://news.ddtc.co.id/dinilai-tahan-banting-kontribusi-umkm-ke-pajak-diharapkan-naik-19020?page_y=0

Sulistyawati, A. I., Lestari, D. I. T., dan Tiandari, N. W. (2012). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari). *InFestasi (Jurnal Bisnis dan Akuntansi), 8*(1), 81-96.

Saeroji, Oji. "Menakar Kadar Kepatuhan Pajak." Pajak.go.id.

https://www.pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak

Sunarto, S., dan Muhammad, A. (2018). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015". *Akuntansi Dewantara*, *2*(1), 37-45.

Suyanto, dan Yahya, K. (2014). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi". *Sumber*, *818*, 25-37.

Tyas, S. A.(2019). Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP No 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak

UMKM Pasar Klewer Surakarta). Skripsi S1 Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Wahda, N.S.R., Bagianto, A., Yunianti. (2018). "Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, *2*(01).

Wahidah, A. N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jurnal El-Riyasah*, *8*(1), 20-29.

Widiawati, H. S. (2016). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepemilikan NPWP, Pelayanan Fiskus dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kota Kediri". *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, (02), p.165-173.

Yuliyanti, R. C. D., & Waluyo, I. (2018). "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, danKesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".*Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, *6*(8).

Yuspitara, A., Susena, K. C., & Herlin, H. (2017). "Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu". *Ekombis Review*, *5*(2), p.198-207.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Data Responden

No	Jenis Usaha	Sektor Usaha	Lama Usaha	Jumlah Karyawan	Omset Usaha	Jenis UMKM
1	Usaha Perseorangan	Usaha Toko Kelontong	5-10 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
2	Usaha Perseorangan	Usaha Bidang Fashion	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
3	Usaha Perseorangan	Agrobisnis	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
4	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
5	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
6	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
7	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
8	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	10-15 Tahun	< 4 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
9	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
10	Usaha Perseorangan	Usaha bahan bangunan	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
11	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
12	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
13	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar	usaha menengah
14	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar	usaha menengah
15	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	>15 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
16	Usaha Perseorangan	Jasa Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
17	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	20-100 orang	Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar	usaha menengah
18	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
19	Usaha Perseorangan	Agrobisnis	5-10 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
20	Usaha badan berbentul	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
21	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
22	Usaha Perseorangan	Jasa Lainnya	< 5 Tahun	5-20 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
23	Usaha Perseorangan	Jasa Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
24	Usaha Perseorangan	Usaha Jasa Laundry	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
25	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	10-15 Tahun	5-20 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
26	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro

27	Usaha Perseorangan	Jasa Lainnya	5-10 Tahun	5-20 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
28	Usaha Perseorangan	Usaha Jasa Laundry	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
29	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
30	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
31	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
32	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
33	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
34	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	20-100 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
35	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
36	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	>15 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
37	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	>15 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
38	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
39	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	5-20 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
40	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	5-10 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
41	Usaha Perseorangan	Usaha Jasa Laundry	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
42	Usaha Perseorangan	Usaha Jasa Laundry	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
43	Usaha Perseorangan	Usaha Jasa Laundry	5-10 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
44	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
45	Usaha Perseorangan	Usaha bidang fashion	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
46	Usaha Perseorangan	Jasa Lainnya	>15 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
47	Usaha Perseorangan	Industi Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
48	Usaha Perseorangan	Usaha Toko Kelontong	>15 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
49	Usaha Perseorangan	Usaha bidang fashion	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
50	Usaha Perseorangan	Usaha bidang fashion	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
51	Usaha Perseorangan	Jasa Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
52	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	5-10 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
53	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
54	Usaha Perseorangan	Industi Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro

55	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
56	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	5-10 Tahun	5-20 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
57	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	>15 Tahun	5-20 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
58	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
59	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
60	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	>15 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
61	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
62	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
63	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	>15 Tahun	20-100 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
64	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
65	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
66	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
67	Usaha Perseorangan	Agrobisnis	< 5 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
68	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
69	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
70	Usaha Perseorangan	Jasa Lainnya	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
71	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	>15 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
72	Usaha Perseorangan	Usaha bidang fashion	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
73	Usaha Perseorangan	Usaha bidang fashion	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
74	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	5-10 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
75	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	5-20 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
76	Usaha Perseorangan	Usaha bidang fashion	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
77	Usaha Perseorangan	Usaha Toko Kelontong	10-15 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	Usaha mikro
78	Usaha Perseorangan	Usaha Bisang Fashion	10-15 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
79	Usaha Perseorangan	Usaha Toko Kelontong	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	Usaha mikro
80	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	> 15 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
81	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	> 15 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
82	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	5-10 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro

83	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	> 15 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
84	Usaha Perseorangan	Usaha Toko Kelontong	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
85	Usaha Perseorangan	Usaha Toko Kelontong	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
86	Usaha Perseorangan	Usaha Toko Kelontong	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
87	Usaha Perseorangan	Usaha bidang fashion	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
88	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
89	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	10-15 Tahun	5-20 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
90	Usaha Perseorangan	Usaha Toko Kelontong	>15 Tahun	< 4 orang	Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar	usaha kecil
91	Usaha Perseorangan	Usaha bidang fashion	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
92	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	>15 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
93	Usaha Perseorangan	Usaha Bahan Bangunan	10-15 Tahun	5-20 orang	Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar	usaha kecil
94	Usaha Perseorangan	Kerajinan	< 5 Tahun	5-20 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
95	Usaha Perseorangan	Perdagangan Lainnya	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
96	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
97	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
98	Usaha Perseorangan	Usaha Jasa Laundry	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
99	Usaha Perseorangan	Usaha Kuliner	< 5 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro
100	Usaha Perseorangan	Usaha Bidang Fashion	5-10 Tahun	< 4 orang	Rp 0 - Rp 300 juta	usaha mikro

Lampiran 2

Data Sampel Variabel Penerimaan Pajak UMKM

No	Penerimaan Pajak UMKM						Y rata-rata
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
1	2	1	3	3	1	3	2,167
2	3	4	4	4	3	4	3,67
3	3	3	4	4	3	3	3,33
4	3	3	3	3	3	2	2,83
5	3	3	3	4	4	4	3,50
6	4	4	4	4	4	4	4,00
7	4	1	3	4	4	4	3,33
8	4	4	4	4	4	4	4,00
9	3	3	3	2	3	3	2,83
10	3	2	3	3	4	3	3,00
11	3	3	3	4	3	3	3,17
12	3	3	3	3	3	4	3,17
13	4	4	4	4	4	4	4,00
14	4	4	4	4	4	4	4,00
15	3	3	4	3	3	3	3,17
16	3	4	4	4	4	4	3,83
17	3	3	3	3	3	3	3,00
18	3	2	3	4	3	3	3,00
19	3	2	3	3	4	3	3,00
20	3	4	4	4	4	4	3,83
21	3	3	3	3	3	3	3,00
22	2	3	3	2	3	2	2,50
23	3	1	3	4	4	4	3,17
24	3	3	3	3	3	3	3,00
25	3	3	3	3	3	3	3,00
26	3	1	3	4	4	4	3,17
27	3	3	3	4	2	3	3,00
28	3	3	3	3	3	3	3,00
29	3	3	3	3	3	3	3,00
30	3	2	4	4	4	4	3,50
31	3	3	3	3	3	3	3,00
32	2	3	3	3	3	3	2,83
33	3	1	3	4	4	4	3,17
34	3	4	4	3	3	4	3,50
35	3	1	3	4	4	4	3,17
36	3	3	3	3	3	3	3,00
37	3	3	3	3	3	3	3,00
38	3	3	3	3	3	3	3,00

39	3	3	3	3	3	3	3,00
40	3	3	4	3	3	3	3,17
41	3	1	1	1	1	4	1,83
42	3	1	1	1	1	4	1,83
43	3	4	4	3	3	3	3,33
44	3	3	3	4	4	4	3,50
45	3	3	3	3	3	3	3,00
46	3	3	3	3	3	3	3,00
47	3	3	3	2	3	3	2,83
48	3	4	4	4	4	3	3,67
49	4	4	4	4	4	4	4,00
50	3	3	3	2	3	3	2,83
51	1	3	3	3	3	3	2,67
52	3	3	4	3	4	4	3,50
53	3	3	4	4	4	4	3,67
54	3	3	4	4	3	3	3,33
55	2	3	3	4	3	3	3,00
56	3	3	3	3	3	3	3,00
57	3	2	3	3	3	3	2,83
58	3	3	4	4	3	4	3,50
59	1	3	3	3	2	3	2,50
60	3	4	4	4	4	3	3,67
61	3	3	4	4	4	4	3,67
62	4	3	3	3	4	3	3,33
63	3	3	3	4	3	3	3,17
64	3	4	3	4	3	4	3,50
65	1	2	3	4	2	3	2,50
66	3	3	3	3	3	3	3,00
67	3	3	3	3	3	3	3,00
68	1	2	3	2	2	2	2,00
69	2	3	3	4	3	3	3,00
70	3	3	3	3	4	3	3,17
71	4	4	4	4	4	3	3,83
72	3	3	3	3	3	3	3,00
73	4	4	4	4	4	4	4,00
74	3	4	3	4	4	4	3,67
75	1	3	3	4	2	3	2,67
76	2	2	2	3	2	3	2,33
77	2	2	3	3	3	3	2,67
78	3	3	3	3	3	3	3,00

79	3	4	3	3	3	2	3,00
80	3	4	4	4	3	4	3,67
81	3	3	3	3	3	3	3,00
82	2	2	2	2	2	2	2,00
83	3	3	4	4	3	3	3,33
84	3	3	3	3	3	3	3,00
85	3	3	3	3	3	3	3,00
86	3	3	3	3	3	3	3,00
87	3	2	3	2	3	3	2,67
88	1	2	2	1	1	1	1,33
89	2	3	3	3	3	3	2,83
90	3	2	3	2	3	3	2,67
91	2	3	3	2	3	2	2,50
92	4	4	3	3	2	3	3,17
93	3	4	4	4	3	3	3,50
94	1	2	3	2	2	2	2,00
95	3	4	3	3	3	4	3,33
96	4	3	3	4	4	3	3,50
97	3	3	4	4	3	3	3,33
98	2	3	3	3	3	4	3,00
99	3	4	2	3	3	4	3,17
100	4	3	3	4	4	3	3,50

Lampiran 3

Data Sampel Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus

NO	Kualitas Pelayanan Fiskus						X1 rata-rata
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	1	2	1	2	3	2	1,8
2	3	3	3	4	3	3	3,2
3	3	3	3	3	3	3	3,0
4	3	3	3	3	3	3	3,0
5	3	3	3	3	3	3	3,0
6	4	4	4	4	2	2	3,3
7	1	1	2	4	3	2	2,2
8	3	4	3	3	4	3	3,3
9	3	3	3	3	3	3	3,0
10	3	3	3	3	3	3	3,0
11	3	4	3	3	3	2	3,0
12	2	2	2	4	2	2	2,3
13	4	4	4	4	4	4	4,0
14	4	4	4	4	4	4	4,0
15	4	3	3	3	3	3	3,2
16	4	3	4	4	3	3	3,5
17	3	3	4	3	3	4	3,3
18	4	4	3	3	3	3	3,3
19	3	3	1	3	3	3	2,7
20	3	3	4	4	4	4	3,7
21	3	3	3	3	3	3	3,0
22	3	3	3	2	2	3	2,7
23	3	1	2	4	2	3	2,5
24	3	3	3	3	3	3	3,0
25	3	3	2	3	2	3	2,7
26	3	1	2	4	2	3	2,5
27	3	3	2	3	2	3	2,7
28	3	3	3	3	3	3	3,0
29	3	3	3	4	2	3	3,0
30	3	1	2	4	2	3	2,5
31	3	2	2	3	3	3	2,7
32	3	3	3	3	3	3	3,0
33	3	1	2	4	2	3	2,5
34	3	2	3	4	3	2	2,8
35	3	1	2	4	2	3	2,5
36	2	3	3	3	3	3	2,8
37	3	3	3	3	3	3	3,0
38	3	3	3	3	3	3	3,0
39	3	3	3	3	3	2	2,8
40	3	3	3	3	3	3	3,0

41	4	4	1	4	1	4	3,0
42	4	4	1	4	1	4	3,0
43	3	3	3	3	3	3	3,0
44	3	3	3	3	2	3	2,8
45	3	3	3	3	3	3	3,0
46	3	3	3	2	3	3	2,8
47	3	3	2	2	2	2	2,3
48	2	2	2	3	2	2	2,2
49	3	3	4	4	3	4	3,5
50	3	3	2	2	3	2	2,5
51	3	3	3	3	3	3	3,0
52	3	3	3	3	3	3	3,0
53	3	3	4	4	4	3	3,5
54	3	3	3	3	3	3	3,0
55	3	2	2	3	3	3	2,7
56	3	3	3	3	2	2	2,7
57	3	3	3	3	3	3	3,0
58	2	2	2	2	1	1	1,7
59	3	3	3	2	3	3	2,8
60	3	3	3	3	3	3	3,0
61	3	3	3	4	3	2	3,0
62	3	3	4	2	2	3	2,8
63	3	3	1	3	2	3	2,5
64	3	3	4	4	3	3	3,3
65	2	2	2	4	2	2	2,3
66	2	2	2	3	3	3	2,5
67	3	3	3	2	2	3	2,7
68	1	1	1	1	2	1	1,2
69	3	3	3	3	3	3	3,0
70	2	3	1	1	2	3	2,0
71	4	4	3	3	3	4	3,5
72	3	3	3	3	3	3	3,0
73	4	4	4	4	4	4	4,0
74	3	3	3	4	3	3	3,2
75	2	2	2	3	2	2	2,2
76	3	3	3	4	4	4	3,5
77	3	3	2	3	3	3	2,8
78	3	3	3	3	3	3	3,0
79	2	4	3	3	3	2	2,8
80	3	3	3	3	3	3	3,0
81	3	3	3	3	3	3	3,0
82	3	3	3	2	3	3	2,8
83	4	3	3	3	3	2	3,0

84	3	3	3	3	3	3	3,0
85	3	3	3	3	3	3	3,0
86	3	3	3	3	3	3	3,0
87	2	4	2	2	1	2	2,2
88	1	2	1	2	1	2	1,5
89	2	2	2	3	2	3	2,3
90	2	2	2	2	2	2	2,0
91	2	2	2	3	2	2	2,2
92	4	4	3	3	3	3	3,3
93	3	3	4	4	2	3	3,2
94	1	1	1	1	2	1	1,2
95	3	3	3	3	3	3	3,0
96	3	3	4	2	2	3	2,8
97	3	4	3	3	2	3	3,0
98	2	2	3	2	2	3	2,3
99	3	4	3	3	2	3	3,0
100	3	3	4	3	4	3	3,3

Lampiran 4

Data Sampel Variabel Sosialisasi Pajak

No	Sosialisasi Pajak					X2 rata-rata
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	1	1	2	4	2	2,0
2	3	3	4	2	4	3,2
3	3	3	3	2	3	2,8
4	3	3	4	3	3	3,2
5	2	3	2	3	3	2,6
6	4	4	4	4	4	4,0
7	2	4	4	1	4	3,0
8	3	3	4	4	3	3,4
9	3	3	4	1	4	3,0
10	3	3	4	3	3	3,2
11	4	3	3	3	3	3,2
12	3	3	3	4	3	3,2
13	4	4	4	4	4	4,0
14	4	4	4	4	4	4,0
15	3	3	3	3	3	3,0
16	3	4	4	4	4	3,8
17	4	4	4	4	4	4,0
18	3	3	3	3	3	3,0
19	2	2	3	2	2	2,2
20	4	4	4	2	2	3,2
21	3	3	3	3	3	3,0
22	2	2	2	2	2	2,0
23	2	4	4	4	1	3,0
24	3	3	3	3	3	3,0
25	3	3	3	3	3	3,0
26	2	4	4	4	1	3,0
27	2	3	3	2	2	2,4
28	3	3	3	3	3	3,0
29	3	2	2	2	3	2,4
30	2	4	4	4	1	3,0
31	3	3	3	3	3	3,0
32	3	3	3	3	3	3,0
33	2	4	4	4	1	3,0
34	3	2	4	3	2	2,8
35	2	4	4	4	1	3,0
36	3	3	3	3	3	3,0

37	3	3	3	3	3	3,0
38	3	3	3	2	3	2,8
39	2	3	2	2	2	2,2
40	3	3	4	3	3	3,2
41	2	2	2	2	2	2,0
42	2	2	2	2	2	2,0
43	3	3	3	3	3	3,0
44	3	3	3	3	3	3,0
45	3	3	3	2	3	2,8
46	3	3	3	3	3	3,0
47	2	3	3	3	3	2,8
48	2	3	3	3	2	2,6
49	3	4	3	4	4	3,6
50	3	3	3	4	2	3,0
51	3	3	3	3	3	3,0
52	3	4	3	3	4	3,4
53	3	4	4	1	3	3,0
54	2	2	2	2	3	2,2
55	3	3	3	3	2	2,8
56	3	3	3	3	3	3,0
57	2	3	3	3	3	2,8
58	2	3	3	3	1	2,4
59	3	3	3	3	3	3,0
60	3	2	3	3	3	2,8
61	3	3	3	3	3	3,0
62	3	4	4	3	2	3,2
63	3	3	3	3	3	3,0
64	3	3	3	3	3	3,0
65	1	1	1	1	1	1,0
66	3	3	3	3	3	3,0
67	2	3	3	3	3	2,8
68	3	2	3	2	2	2,4
69	3	4	4	3	3	3,4
70	3	3	4	4	3	3,4
71	3	3	3	3	3	3,0
72	3	3	3	3	3	3,0
73	4	4	4	4	4	4,0
74	3	3	3	3	3	3,0

75	1	4	3	1	2	2,2
76	3	3	3	3	2	2,8
77	3	3	3	3	3	3,0
78	3	3	3	3	3	3,0
79	1	3	3	3	3	2,6
80	3	3	3	2	3	2,8
81	3	3	3	3	3	3,0
82	2	2	2	2	2	2,0
83	3	3	2	3	3	2,8
84	3	4	4	4	4	3,8
85	3	3	3	3	3	3,0
86	3	3	3	3	3	3,0
87	1	1	2	2	3	1,8
88	1	2	1	2	1	1,4
89	2	3	2	2	3	2,4
90	2	2	2	3	2	2,2
91	2	2	4	3	2	2,6
92	2	3	3	4	3	3,0
93	3	4	4	3	3	3,4
94	3	2	3	2	2	2,4
95	3	3	3	3	3	3,0
96	3	4	3	2	3	3,0
97	3	4	4	3	3	3,4
98	3	3	4	2	2	2,8
99	4	2	2	1	2	2,2
100	4	3	4	3	3	3,4

Lampiran 5

Data Sampel Variabel Perubahan Tarif

No	Perubahan Tarif Pajak						X3 rata-rata
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	1	4	4	3	4	4	3,3
2	3	3	3	3	3	3	3,0
3	3	3	3	3	3	3	3,0
4	3	2	2	2	2	2	2,2
5	2	3	3	3	3	3	2,8
6	4	4	4	4	4	4	4,0
7	1	1	1	1	1	1	1,0
8	4	3	2	3	2	3	2,8
9	3	3	3	3	3	3	3,0
10	4	4	3	3	3	3	3,3
11	3	4	3	3	3	3	3,2
12	3	4	3	3	3	3	3,2
13	3	4	4	4	4	4	3,8
14	3	4	4	4	4	4	3,8
15	3	4	4	3	3	3	3,3
16	4	4	4	4	4	4	4,0
17	4	4	3	4	4	4	3,8
18	4	4	3	4	3	3	3,5
19	3	3	3	3	3	2	2,8
20	4	4	4	4	4	4	4,0
21	3	3	3	3	3	3	3,0
22	3	3	3	3	2	2	2,7
23	1	1	1	1	1	4	1,5
24	3	3	3	2	2	3	2,7
25	3	3	3	2	3	3	2,8
26	1	1	1	1	1	4	1,5
27	2	3	3	3	3	2	2,7
28	3	3	3	3	3	3	3,0
29	3	3	3	3	3	3	3,0
30	1	1	1	1	1	4	1,5
31	3	3	3	3	3	3	3,0
32	3	3	3	3	3	3	3,0
33	1	1	1	1	1	4	1,5
34	3	2	2	3	3	3	2,7

35	1	1	1	1	1	4	1,5
36	2	3	3	3	3	3	2,8
37	3	3	3	3	3	3	3,0
38	3	3	3	3	3	3	3,0
39	3	3	3	3	3	3	3,0
40	3	4	3	3	3	3	3,2
41	3	4	4	4	4	2	3,5
42	3	4	4	4	4	2	3,5
43	3	3	3	3	3	3	3,0
44	2	2	2	2	2	2	2,0
45	3	3	3	3	3	3	3,0
46	3	3	3	3	3	3	3,0
47	3	3	3	3	3	3	3,0
48	2	2	2	2	3	2	2,2
49	4	4	4	4	4	4	4,0
50	4	3	3	3	4	4	3,5
51	3	3	1	3	2	2	2,3
52	4	4	4	4	4	3	3,8
53	3	3	2	3	2	3	2,7
54	3	2	2	2	3	3	2,5
55	2	2	2	2	2	2	2,0
56	3	3	3	3	3	3	3,0
57	3	3	3	3	3	3	3,0
58	4	4	3	3	2	2	3,0
59	2	3	3	3	3	3	2,8
60	3	3	3	3	3	3	3,0
61	4	4	4	4	4	4	4,0
62	2	2	2	2	2	2	2,0
63	3	3	3	3	3	3	3,0
64	4	4	3	3	4	3	3,5
65	2	2	2	2	2	2	2,0
66	3	3	3	3	3	3	3,0
67	3	3	3	3	3	3	3,0
68	3	3	3	3	2	2	2,7
69	3	3	3	3	3	3	3,0
70	4	2	2	1	1	1	1,8
71	4	4	4	4	4	4	4,0
72	3	3	3	3	3	3	3,0
73	4	4	4	3	3	3	3,5
74	3	3	3	3	3	3	3,0

75	2	2	2	2	2	2	2,0
76	3	3	2	3	3	3	2,8
77	2	2	2	3	2	2	2,2
78	3	3	3	3	3	3	3,0
79	3	3	3	3	3	3	3,0
80	3	3	3	3	3	3	3,0
81	3	3	3	2	2	2	2,5
82	3	3	3	2	2	2	2,5
83	2	2	2	2	2	2	2,0
84	3	3	3	3	3	3	3,0
85	3	3	3	3	3	3	3,0
86	3	3	3	3	3	3	3,0
87	2	1	2	1	2	1	1,5
88	1	2	1	2	1	2	1,5
89	3	3	3	3	3	3	3,0
90	3	3	2	3	2	3	2,7
91	3	2	2	2	2	2	2,2
92	3	3	3	4	3	3	3,2
93	3	3	3	3	3	3	3,0
94	3	3	3	3	2	2	2,7
95	3	3	3	3	3	3	3,0
96	3	3	3	3	4	3	3,2
97	3	4	3	4	4	4	3,7
98	2	2	3	2	2	2	2,2
99	3	2	2	2	2	3	2,3
100	3	3	2	3	4	4	3,2

Lampiran 6

Data Sampel Variabel Tingkat Kepatuhan Pajak

No	Tingkat Kepatuhan Pajak						X4 rata-rata
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.5	
1	1	1	1	1	1	1	1,0
2	3	3	3	3	3	3	3,0
3	3	3	3	3	3	3	3,0
4	4	2	2	2	2	2	2,3
5	3	3	3	3	3	3	3,0
6	4	4	4	4	4	4	4,0
7	1	3	3	4	4	2	2,8
8	2	3	3	2	3	3	2,7
9	3	3	3	3	3	3	3,0
10	4	3	3	3	3	3	3,2
11	4	3	4	3	4	3	3,5
12	3	3	4	3	3	3	3,2
13	4	4	4	4	4	3	3,8
14	4	4	4	4	4	3	3,8
15	4	3	3	3	3	3	3,2
16	4	3	3	4	4	4	3,7
17	4	4	4	4	4	4	4,0
18	3	3	3	2	3	2	2,7
19	3	3	3	2	2	3	2,7
20	4	4	2	3	3	3	3,2
21	3	3	3	3	3	3	3,0
22	2	2	2	2	2	2	2,0
23	1	3	3	4	4	2	2,8
24	2	2	2	2	2	2	2,0
25	2	2	2	2	2	2	2,0
26	1	3	3	4	4	2	2,8
27	2	2	2	2	3	2	2,2
28	3	3	3	3	3	3	3,0
29	3	3	3	3	3	3	3,0
30	1	3	3	4	4	2	2,8
31	3	3	3	3	3	3	3,0
32	3	3	3	3	3	3	3,0
33	1	3	3	4	4	3	3,0
34	2	2	3	2	3	2	2,3
35	1	3	3	4	4	2	2,8

36	3	3	3	3	3	3	3,0
37	3	3	3	3	3	3	3,0
38	3	3	3	3	3	3	3,0
39	3	3	3	3	3	3	3,0
40	3	3	3	3	3	3	3,0
41	1	1	2	2	2	2	1,7
42	1	1	2	2	2	2	1,7
43	3	3	3	3	3	3	3,0
44	3	3	3	3	4	3	3,2
45	3	3	3	3	3	3	3,0
46	3	3	3	3	3	3	3,0
47	3	3	3	3	3	3	3,0
48	3	3	4	4	4	3	3,5
49	3	3	3	4	4	4	3,5
50	2	2	2	2	2	2	2,0
51	3	3	3	3	3	3	3,0
52	3	3	4	4	4	4	3,7
53	3	3	3	3	4	4	3,3
54	2	3	3	3	3	4	3,0
55	3	2	3	3	3	2	2,7
56	3	3	3	3	3	3	3,0
57	2	3	3	3	3	3	2,8
58	2	3	3	3	3	3	2,8
59	3	2	2	3	2	2	2,3
60	3	3	3	2	3	3	2,8
61	4	3	3	3	3	3	3,2
62	3	4	3	4	3	2	3,2
63	2	2	3	2	3	3	2,5
64	4	4	4	4	4	4	4,0
65	2	2	2	2	2	2	2,0
66	3	3	3	3	3	3	3,0
67	3	3	2	2	2	2	2,3
68	4	1	2	2	2	1	2,0
69	3	3	3	3	3	3	3,0
70	1	2	3	3	4	2	2,5
71	4	4	4	4	4	3	3,8
72	3	4	3	3	3	3	3,2
73	4	4	4	4	4	4	4,0
74	2	3	3	3	3	4	3,0
75	3	3	2	2	2	2	2,3
76	4	2	2	3	3	3	2,8
77	2	2	3	2	2	2	2,2
78	3	3	3	3	3	3	3,0

79	2	3	3	3	3	3	2,8
80	3	3	3	3	3	3	3,0
81	3	3	3	3	2	2	2,7
82	2	3	2	3	2	2	2,3
83	3	3	3	2	2	3	2,7
84	3	3	3	3	3	3	3,0
85	3	3	3	3	3	3	3,0
86	3	3	3	3	3	3	3,0
87	2	1	2	1	2	1	1,5
88	1	2	2	1	2	1	1,5
89	2	3	2	3	3	3	2,7
90	3	3	2	2	3	3	2,7
91	3	2	2	2	2	3	2,3
92	3	4	3	3	4	3	3,3
93	3	4	3	4	3	3	3,3
94	4	1	2	2	2	1	2,0
95	3	3	3	3	3	3	3,0
96	3	4	2	3	3	3	3,0
97	4	3	3	2	4	3	3,2
98	2	3	3	2	3	2	2,5
99	3	3	4	4	3	3	3,3
100	3	3	4	4	3	4	3,5

Lampiran 7

Data Sampel Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

No	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak								X5 rata-rata
	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X5.7	X5.8	
1	1	3	3	3	4	3	3	3	2,9
2	2	2	3	2	3	2	2	2	2,3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
4	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
5	3	3	3	3	4	3	3	4	3,3
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
7	4	4	4	1	1	1	1	2	2,3
8	3	4	3	4	3	3	3	4	3,4
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
11	4	3	3	4	3	3	3	3	3,3
12	3	4	3	3	3	1	1	1	2,4
13	4	4	4	3	3	3	3	3	3,4
14	4	4	4	3	3	3	3	3	3,4
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
17	4	3	4	4	4	4	4	4	3,9
18	3	3	3	4	4	4	3	3	3,4
19	2	3	3	3	3	2	3	3	2,8
20	4	4	4	3	4	4	4	4	3,9
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
22	2	3	3	3	2	2	2	3	2,5
23	4	4	4	1	1	1	1	2	2,3
24	3	3	3	3	2	2	2	3	2,6
25	3	3	2	2	2	2	2	2	2,3
26	4	4	4	1	1	1	1	2	2,3
27	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
30	4	4	4	1	1	1	1	2	2,3
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
33	4	4	4	1	1	1	1	2	2,3
34	2	2	2	3	2	2	3	3	2,4

35	4	4	4	1	1	1	1	2	2,3
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
39	2	2	3	2	2	2	2	2	2,1
40	3	3	4	3	3	3	3	3	3,1
41	1	2	2	2	2	2	4	2	2,1
42	1	2	2	2	2	2	4	2	2,1
43	4	3	3	3	3	3	3	3	3,1
44	2	2	2	2	3	3	3	3	2,5
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
46	3	3	3	3	3	3	2	3	2,9
47	3	3	3	3	2	2	3	3	2,8
48	3	2	2	3	2	2	2	2	2,3
49	3	3	4	4	4	3	4	3	3,5
50	4	3	4	4	3	3	3	4	3,5
51	2	3	3	3	3	3	3	3	2,9
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
53	3	3	2	3	3	3	3	3	2,9
54	3	3	3	3	3	3	4	3	3,1
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
58	3	2	3	3	3	3	3	3	2,9
59	3	2	3	3	3	3	2	3	2,8
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
61	3	3	4	4	3	4	4	4	3,6
62	2	3	2	3	3	3	3	3	2,8
63	3	3	3	3	3	2	3	3	2,9
64	4	4	4	4	4	4	3	4	3,9
65	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
68	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
69	2	3	3	3	3	3	3	3	2,9
70	1	1	2	3	1	1	1	4	1,8
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
73	3	3	2	4	4	4	4	4	3,5
74	3	3	3	3	3	3	3	4	3,1
75	3	1	3	4	1	1	2	2	2,1
76	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
77	3	3	3	2	2	2	2	2	2,4
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0

79	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
81	1	2	2	2	2	2	2	2	1,9
82	1	2	2	2	2	2	2	2	1,9
83	3	3	3	3	3	3	3	2	2,9
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
85	4	3	3	3	2	2	2	3	2,8
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
87	2	1	1	2	1	2	3	1	1,6
88	1	2	2	2	2	1	2	1	1,6
89	3	3	3	3	2	3	2	3	2,8
90	2	3	3	3	2	3	3	3	2,8
91	2	3	3	3	2	2	2	3	2,5
92	3	3	4	3	3	3	3	3	3,1
93	3	4	4	4	3	3	3	3	3,4
94	2	2	2	2	2	2	2	2	2,0
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3,0
96	3	4	3	3	3	3	3	3	3,1
97	3	3	3	4	4	3	3	3	3,3
98	3	3	3	2	2	2	2	4	2,6
99	3	2	3	3	2	2	2	3	2,5
100	3	3	4	3	3	4	4	3	3,4

Lampiran 8

Hasil Uji Deskriptif

1. Penerimaan Pajak UMKM

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PN1	100	1	4	2,87	,706
PN2	100	1	4	2,92	,825
PN3	100	1	4	3,19	,598
PN4	100	1	4	3,25	,757
PN5	100	1	4	3,12	,729
PN6	100	1	4	3,22	,613
Valid N (listwise)	100				

2. Kualitas Pelayanan Fiskus

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PF1	100	1	4	2,88	,671
PF2	100	1	4	2,84	,775
PF3	100	1	4	2,73	,815
PF4	100	1	4	3,05	,730
PF5	100	1	4	2,67	,697
PF6	100	1	4	2,84	,631
Valid N (listwise)	100				

3. Sosialisasi Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SP1	100	1	4	2,73	,709
SP2	100	1	4	3,02	,710
SP3	100	1	4	3,12	,715
SP4	100	1	4	2,85	,796
SP5	100	1	4	2,74	,774
Valid N (listwise)	100				

4. Perubahan Tarif Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PT1	100	1	4	2,86	,779
PT2	100	1	4	2,93	,820
PT3	100	1	4	2,78	,786
PT4	100	1	4	2,82	,783
PT5	100	1	4	2,79	,832
PT6	100	1	4	2,89	,723
Valid N (listwise)	100				

5. Tingkat Kepatuhan Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP1	100	1	4	2,77	,874
KP2	100	1	4	2,85	,716
KP3	100	1	4	2,88	,624
KP4	100	1	4	2,90	,759
KP5	100	1	4	3,00	,696
KP6	100	1	4	2,75	,716
Valid N (listwise)	100				

6. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PNG1	100	1	4	2,86	,792
PNG2	100	1	4	2,92	,692
PNG3	100	1	4	3,00	,667
PNG4	100	1	4	2,85	,744
PNG5	100	1	4	2,69	,800
PNG6	100	1	4	2,64	,798
PNG7	100	1	4	2,72	,780
PNG8	100	1	4	2,85	,687
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 9

Hasil Uji Validitas

1. Peneriman Pajak UMKM

Correlations

		PN1	PN2	PN3	PN4	PN5	PN6	Skor_total
PN1	Pearson Correlation	1	,312**	,322**	,345**	,581**	,464**	,699**
	Sig. (2-tailed)		,002	,001	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PN2	Pearson Correlation	,312**	1	,543**	,323**	,302**	,115	,627**
	Sig. (2-tailed)	,002		,000	,001	,002	,254	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PN3	Pearson Correlation	,322**	,543**	1	,630**	,573**	,271**	,768**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,000	,006	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PN4	Pearson Correlation	,345**	,323**	,630**	1	,604**	,490**	,785**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PN5	Pearson Correlation	,581**	,302**	,573**	,604**	1	,461**	,813**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PN6	Pearson Correlation	,464**	,115	,271**	,490**	,461**	1	,626**
	Sig. (2-tailed)	,000	,254	,006	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Skor_total	Pearson Correlation	,699**	,627**	,768**	,785**	,813**	,626**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Kualitas Pelayanan Fiskus

Correlations

		PF1	PF2	PF3	PF4	PF5	PF6	Total
PF1	Pearson Correlation	1	,604**	,513**	,446**	,325**	,622**	,816**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,001	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PF2	Pearson Correlation	,604**	1	,475**	,068	,294**	,422**	,681**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,502	,003	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PF3	Pearson Correlation	,513**	,475**	1	,312**	,571**	,406**	,785**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,002	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PF4	Pearson Correlation	,446**	,068	,312**	1	,251*	,412**	,577**
	Sig. (2-tailed)	,000	,502	,002		,012	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PF5	Pearson Correlation	,325**	,294**	,571**	,251*	1	,384**	,663**
	Sig. (2-tailed)	,001	,003	,000	,012		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PF6	Pearson Correlation	,622**	,422**	,406**	,412**	,384**	1	,742**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	,816**	,681**	,785**	,577**	,663**	,742**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Sosialisasi Pajak

Correlations

		SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	Nilai_Total
SP1	Pearson Correlation	1	,392**	,464**	,232*	,534**	,733**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,020	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
SP2	Pearson Correlation	,392**	1	,692**	,380**	,304**	,773**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,002	,000
	N	100	100	100	100	100	100
SP3	Pearson Correlation	,464**	,692**	1	,405**	,258**	,786**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,010	,000
	N	100	100	100	100	100	100
SP4	Pearson Correlation	,232*	,380**	,405**	1	,133	,621**
	Sig. (2-tailed)	,020	,000	,000		,188	,000
	N	100	100	100	100	100	100
SP5	Pearson Correlation	,534**	,304**	,258**	,133	1	,634**
	Sig. (2-tailed)	,000	,002	,010	,188		,000
	N	100	100	100	100	100	100
Nilai_Total	Pearson Correlation	,733**	,773**	,786**	,621**	,634**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4. Perubahan Tarif Pajak

Correlations

		PT1	PT2	PT3	PT4	PT5	PT6	Nilai_Total
PT1	Pearson Correlation	1	,728**	,626**	,670**	,593**	,170	,769**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,092	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PT2	Pearson Correlation	,728**	1	,854**	,877**	,793**	,328**	,930**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PT3	Pearson Correlation	,626**	,854**	1	,788**	,809**	,277**	,885**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,005	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PT4	Pearson Correlation	,670**	,877**	,788**	1	,840**	,375**	,923**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PT5	Pearson Correlation	,593**	,793**	,809**	,840**	1	,465**	,913**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PT6	Pearson Correlation	,170	,328**	,277**	,375**	,465**	1	,517**
	Sig. (2-tailed)	,092	,001	,005	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Nilai_Total	Pearson Correlation	,769**	,930**	,885**	,923**	,913**	,517**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Tingkat Kepatuhan Pajak

Correlations

		KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP6	Total
KP1	Pearson Correlation	1	,412**	,356**	,224*	,182	,456**	,589**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,025	,069	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KP2	Pearson Correlation	,412**	1	,637**	,679**	,628**	,655**	,847**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KP3	Pearson Correlation	,356**	,637**	1	,700**	,721**	,633**	,842**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KP4	Pearson Correlation	,224*	,679**	,700**	1	,765**	,567**	,824**
	Sig. (2-tailed)	,025	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KP5	Pearson Correlation	,182	,628**	,721**	,765**	1	,567**	,802**
	Sig. (2-tailed)	,069	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
KP6	Pearson Correlation	,456**	,655**	,633**	,567**	,567**	1	,820**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Total	Pearson Correlation	,589**	,847**	,842**	,824**	,802**	,820**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

6. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Correlations

		PNG1	PNG2	PNG3	PNG4	PNG5	PNG6	PNG7	PNG8	NilaiTotal
PNG1	Pearson Correlation	1	,699**	,727**	,221*	,218*	,271**	,067	,351**	,600**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,027	,029	,006	,509	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PNG2	Pearson Correlation	,699**	1	,745**	,134	,320**	,277**	,108	,336**	,606**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,185	,001	,005	,285	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PNG3	Pearson Correlation	,727**	,745**	1	,224*	,265**	,266**	,117	,397**	,624**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,025	,008	,008	,248	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PNG4	Pearson Correlation	,221*	,134	,224*	1	,736**	,725**	,659**	,687**	,763**
	Sig. (2-tailed)	,027	,185	,025		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PNG5	Pearson Correlation	,218*	,320**	,265**	,736**	1	,868**	,750**	,631**	,835**
	Sig. (2-tailed)	,029	,001	,008	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PNG6	Pearson Correlation	,271**	,277**	,266**	,725**	,868**	1	,827**	,711**	,863**
	Sig. (2-tailed)	,006	,005	,008	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PNG7	Pearson Correlation	,067	,108	,117	,659**	,750**	,827**	1	,562**	,718**
	Sig. (2-tailed)	,509	,285	,248	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
PNG8	Pearson Correlation	,351**	,336**	,397**	,687**	,631**	,711**	,562**	1	,802**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100
NilaiTotal	Pearson Correlation	,600**	,606**	,624**	,763**	,835**	,863**	,718**	,802**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 10

Hasil Uji Reliabilitas

1. Penerimaan Pajak UMKM

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,808	6

2. Kualitas Pelayanan Fiskus

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,800	6

3. Sosialisasi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,747	5

4. Perubahan Tarif Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,908	6

5. Tingkat Kepatuhan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,867	6

6. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,873	8

Lampiran 11

Hasil Uji Normalitas dan Uji Koefisien Determinasi

a) Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,84918135
Most Extreme Differences	Absolute	,053
	Positive	,053
	Negative	-,053
Test Statistic		,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

b) Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,794[a]	,630	,610	1,898

a. Predictors: (Constant), X5, X2, X1, X3, X4

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 12

Hasil Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas

a) Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,900	1,235		3,967	,000		
	X1	,150	,090	,152	1,674	,097	,480	2,084
	X2	,257	,106	,221	2,416	,018	,471	2,125
	X3	-,204	,074	-,263	-2,756	,007	,433	2,308
	X4	,357	,090	,401	3,949	,000	,382	2,621
	X5	,211	,079	,302	2,688	,009	,311	3,211

a. Dependent Variable: Y

b) Uji Heteroskedastisitas

Correlations

			X1	X2	X3	X4	X5	Unstandardized Residual
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1,000	,532**	,593**	,624**	,653**	-,035
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,000	,000	,731
		N	100	100	100	100	100	100
	X2	Correlation Coefficient	,532**	1,000	,417**	,614**	,517**	,012
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,000	,000	,904
		N	100	100	100	100	100	100
	X3	Correlation Coefficient	,593**	,417**	1,000	,529**	,732**	-,027
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,000	,000	,787
		N	100	100	100	100	100	100
	X4	Correlation Coefficient	,624**	,614**	,529**	1,000	,654**	,020
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	.	,000	,846
		N	100	100	100	100	100	100
	X5	Correlation Coefficient	,653**	,517**	,732**	,654**	1,000	,023
		Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	.	,818
		N	100	100	100	100	100	100
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-,035	,012	-,027	,020	,023	1,000
		Sig. (2-tailed)	,731	,904	,787	,846	,818	.
		N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 13

Hasil uji Regresi dan Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,900	1,235		3,967	,000		
	X1	,150	,090	,152	1,674	,097	,480	2,084
	X2	,257	,106	,221	2,416	,018	,471	2,125
	X3	-,204	,074	-,263	-2,756	,007	,433	2,308
	X4	,357	,090	,401	3,949	,000	,382	2,621
	X5	,211	,079	,302	2,688	,009	,311	3,211

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 14

Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran : 1 berkas

Hal :Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i selaku responden

di tempat

Assalamualaikum wr. wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu, saya :

Nama : Zulia Dian Fauzia

No. Mahasiswa : 16312206

Tempat/tanggal lahir : Bantul, 4 Juli 1998

Program Studi : Akuntansi

Jenjang : Strata 1 (S1)

bermaksud memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner yang terlampir pada surat ini. Data yang telah diisi digunakan untuk menyusun skripsi/Tugas Akhir

Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i sangat penting bagi kesuksesan studi ini. Kerahasiaanjawaban sepenuhnya akan dijamin. Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb

Yogyakarta, 25 Februari2020
Peneliti,

Zulia Dian Fauzia

Lampiran 15

Nama :

Alamat :

Petunjuk Pengisian

Pilihlah dan berilah tanda centang (√) pada salah satu jawaban Anda dari pernyataan di bawah ini!

A. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin
   □ Laki-Laki □ Wanita
2. Usia
   □ < 25 Tahun
   □ 25-50 Tahun
   □ > 50 Tahun
3. Agama :
4. Pekerjaan : (Sampingan/Utama)
   Sebutkan_____
5. Pendidikan
   □ SMA □ D3 □ D4/S1 □ S2 □ Lainnya

B. Identitas Usaha

6. Apa jenis usaha yang Anda jalankan?
   □ Usaha Perseorangan
   □ Usaha badan berbentuk koperasi
   □ Usaha badan berbentuk persekutuan komanditer
   □ Usaha badan berbentuk firma
   □ Usaha badan berbentuk perseroan terbatas
7. Apa sektor usaha yang Anda jalankan?
   □ Agrobisnis □ Industri Lainnya
   □ Usaha Bahan Bangunan □ Perdagangan Lainnya
   □ Usaha Bidang Fashion □ Jasa lainnya
   □ Usaha Kuliner
   □ Usaha Toko Kelontong

□ Usaha Jasa Laundry

□ Kerajinan

8. Berapa lama usaha Anda berjalan ?

□ < 5 tahun

□ 5-10 tahun

□ >10-15 tahun

□ > 15 tahun

9. Berapa jumlah karyawan yang Anda punya ?

□ < 4 orang

□ 5-20 orang

□ >20-100 orang

□ > 100 orang

10. Berapa aset usaha Anda ?

□ Rp 0 – Rp 50 juta

□ Rp 50 juta – Rp 500 juta

□ Rp 500 juta – Rp 10 Miliar

11. Berapa omset yang Anda peroleh dalam satu tahun ?

□ Rp 0 – Rp 300 juta (Usaha Mikro)

□ Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar (Usaha Kecil)

□ Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar (Usaha Menengah)

12. Berapa peredaran bruto yang Anda peroleh dalam setahun?

□ ≤ Rp 4.800.000.000

□ > Rp 4.800.000.000

C. Kewajiban Perpajakan

13. Kapan Anda memiliki NPWP ?_____

14. Apakah Anda masih aktif membayar pajak ?

□ Ya □ Tidak

15. Apakah Anda mengetahui besaran tarif pajak turun menjadi 0,5% dari omset (laba kotor usaha) untuk peredaran bruto di bawah 4,8 Milyar?

□ Ya □ Tidak

16. Kapan Anda mengetahui tentang turunnya tarif pajak UMKM menjadi 0,5%?

_____

17.

Berikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i pada kolom yang tersedia!. Angka 1-4 menunjukkann skala persetujuan terhadap pernyataan. Angka 1 menunjukkann pernyataan Bapak/Ibu/Saudara/i yang sangat tidak setuju dan angka 4 menunjukkann pernyataan sangat setuju

Keterangan :

Skor	Pilihan/Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju
2	Tidak Setuju
3	Setuju
4	Sangat Setuju

1. Penerimaan Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Dengan adanya perubahan tarif PP 23 Tahun 2018 penerimaan pajak dapat meningkat				
2.	Penundaan pembayaran dan pengurangan pajak dapat merugikan negara				
3.	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan negara				
4.	Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar				
5.	Perlunya berbagai upaya agar penerimaan di sektor pajak semakin meningkat				
6.	Kerjasama fiskus dan Wajib Pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan				

2. Pelayanan Fiskus

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Aparat (pegawai) pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik				
2.	Fasilitas yang diberikan oleh kantor pajak sudah memadai				
3.	Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil (sesuai)				
4.	Saya merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh aparat pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban selaku Wajib Pajak				
5.	Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenankan				
6.	Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah/efisien				

3. Sosialisasi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Kantor Pelayanan Pajak memberikan penyuluhan informasi penerapan dan pemberitahuan tarif pajak UMKM yang baru				
2.	Pengenalan PP No 23 Tahun 2018 kepada Wajib Pajak dilakukan melalui media cetak seperti spanduk di jala-jalan, iklan di surat kabar atau majalah, dan brosur				
3.	Pengenalan PP No 23 Tahun 2018 kepada Wajib Pajak dilakukan melalui media elektronik, seperti iklan televisi dan *website* pajak				
4.	Pengenalan PP No 23 Tahun 2018 kepada Wajib Pajak dilakukan melalui penyebaran surat edaran				
5.	Penjelasan singkat tentang Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 telah dilakukan oleh pegawai pajak/fiskus setiap kali Wajib Pajak UMKM datang ke Kantor Pelayanan Pajak				

4. Perubahan Tarif Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Tarif dalam PP No 23 Tahun 2018 tidak memberatkan Wajib Pajak UMKM				
2.	Tarif dalam PP No 23 Tahun 2018 sudah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat				
3.	Tarif pajak 0,5% bersifat final dalam PP No 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan dalam menjalankan peraturan perpajakan				
4.	Dengan tarif 0,5% untuk setiap usaha yang memiliki omzet di bawah 4,8 M wajib pajak di untungkan				
5.	Tarif pajak 0,5% bersifat final dalam PP No 23 Tahun 2018 sebagai upaya penyederhanaan aturan perpajakan				
6.	Saya secara sukarela memilih tarif PP No 23 Tahun 2018 untuk menghitung besarnya kewajiban pajak yang harus di bayar				

5. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP Pratama				
2.	Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan				
3.	Saya selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu				
4.	Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya				
5.	Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu				
6.	Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum pemeriksaan				

6. Pengetahuan dan PemahamanWajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1.	Saya memahami cara memperhitungkan pajak penghasilan (PP No 23 Tahun 2018) yang harus di bayar dan angsuran pajak setiap bulannya				
2.	Saya memahami tata cara pembayaran pajak				
3.	Saya memahami batas waktu pembayaran pajak untuk setiap bulannya				
4.	Saya memahami sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak				
5.	Saya memahami cara mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)				
6.	Saya memahami tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)				
7.	Saya memahami batas penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)				
8.	Saya memahami sanksi atas keterlambatan pelaporan pajak				

Saran untuk sistem perpajakan di Indonesia

_____
_____
_____
_____
_____
_____